



**PENGARUH SANKSI PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN,  
PEMAHAMAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK  
TERHADAP PENUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi  
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala

Diajukan Oleh:

**EVA OKTAVIANA WULANDARI**

**NIM : 20104839**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA  
JEMBER  
2024**



**PENGARUH SANKSI PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN,  
PEMAHAMAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK  
TERHADAP PENUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi  
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala

Diajukan Oleh:

**EVA OKTAVIANA WULANDARI**

**NIM : 20104839**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA  
JEMBER  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA**

---

**PENGARUH SANKSI PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN,  
PEMAHAMAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
PENUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN  
BANYUWANGI**

NAMA : EVA OKTAVIANA WULANDARI

NIM : 20104839

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

MINAT STUDI : PERPAJAKAN

Di setujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Asisten,



Dr. Agustin HP, M.M.  
NIDN. 0717086201



Muhammad Rijalus S, S.E., M.Ak  
NIDN. 0712119101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonom dan Bisnis  
Institut Teknologi dan Sains Mandala,

Kaprodi Akuntansi FEB  
Institut Teknologi dan Sains Mandala,



Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P  
NIDN. 0008077101



Nur Kartika Sari, S.E., M.M  
NIDN. 0714088901

**HALAMAN PESETUJUAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA**

**PENGARUH SANKSI PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN,  
PEMAHAMAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK  
TERHADAP PENUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Telah dipertahankan tim penguji skripsi pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024  
Jam : 12.00  
Tempat : Ruang Sidang ITS Mandala

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi:

Dr. Yuniorita Indah H., S.E., MBA : .....  
Ketua Penguji

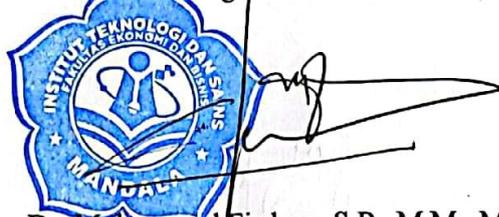
Muhammad Rijalus Sholihin, S.E., M.Ak : .....  
Sekretaris Penguji

Dr. Agustin H.P., M.M : .....  
Anggota Penguji

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonom dan Bisnis  
Institut Teknologi dan Sains Mandala,

Kaprodi Akuntansi FEB  
Institut Teknologi dan Sains Mandala,



Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.  
NIDN. 0008077101



Endang Hartika Sari, S.E., M.M.  
NIDN. 0008077101

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva Oktaviana Wulandari  
NIM : 20104839  
Program Studi : Akuntansi  
Minat Studi : Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : **PENGARUH SANKSI PAJAK, TINGKAT  
PENDAPATAN, PEMAHAMAN PAJAK DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
PENUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini terbukti hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya siap menanggung risiko dibatalkannya karya ilmiah yang telah saya buat dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Saya menyusun pernyataan ini dengan sepenuhnya jujur, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Jember, 10 Mei 2024

Yang menyatakan,



**Eva Oktaviana Wulandari**  
NIM : 20104839

## **MOTTO**

*Fa inna ma'al-'usri yusra, inna ma'al-'usri yusra*

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

**(QS. Al-Insyirah 5-6)**



## KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayahnya kepada kita semua, agar penulis memperoleh gelas Sarjana S1 Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala dengan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian tidaklah sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Banyak pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

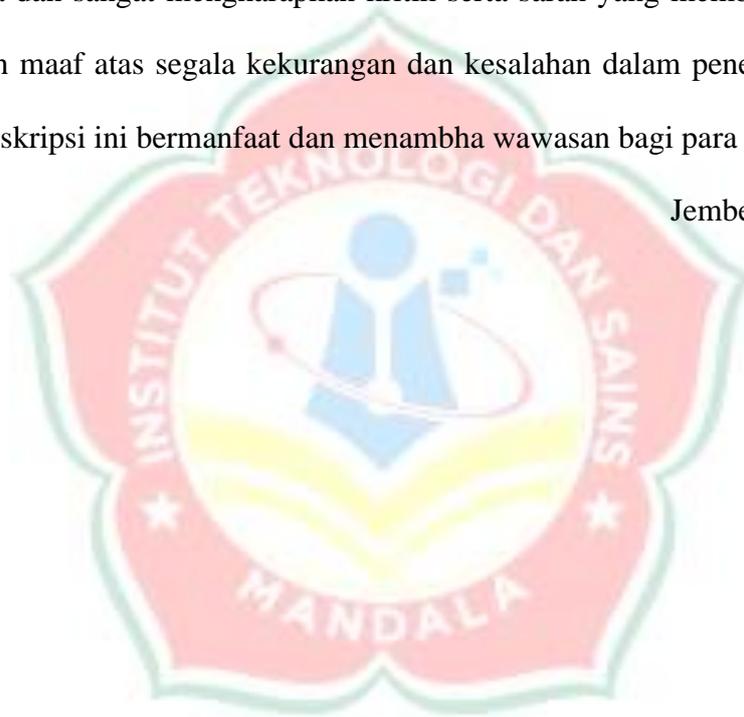
1. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P selaku Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala
2. Bapak Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala
3. Ibu Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala
4. Ibu Dr. Agustin HP, MM sebagai Dosen Pembimbing Utama yang dengan sukarela meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, krtitik, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Muhammad Rijalus Sholihin, S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Asisten yang telah memberikan *support* serta pengarahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Akademika Institut Teknologi dan Sains Mandala.

7. LLDIKTI yang telah memberikan kesempatan bagi anak bangsa yang kurang mampu dan mempunyai kemauan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan.
8. orang tua saya, Almarhum Bapak Saptono dan Ibu Yuliati yang sangat saya sayangi, terimakasih atas segala nasihat, doa, kasih sayang dan dukungan yang tiada hentinya. Tanpa dukungan bapak dan ibu, peneliti tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Irma Aisyah Mulyawati dan Haris Tio Manoko selaku kakak kandung saya yang memberikan doa dan dukungan tiada hentinya.
10. Sahabat sekaligus saudara Sherly, Andini, Adiba, Arni, Nata dan Melfin yang telah menemani dari awal hingga akhir perkuliahan, yang telah menjadi teman keseharian baik suka maupun duka, menjadi penguat, pendengar yang baik, memberikan semangat tiada henti, dan menjadi tempat berbagi dalam segala hal selama menjalani perkuliahan.
11. Teman-teman angkatan 2020 dari kelas AB Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.
12. Untuk orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah banyak membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini serta memberikan semangat dan motivasi sehingga saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

13. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri yang sudah mau dan mampu menyelesaikan tanggung jawab yang diambil sendiri. Pencapaian ini merupakan hasil dari keputusan yang pernah saya ambil sebelumnya.

Sebagai penutup, penulis berharap agar Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari penelitian ini belum sempurna dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini, serta berharap skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Jember, 10 Mei 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Batasan Masalah.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Kajian Teori.....	20
2.2.1 Definisi Pajak.....	20
2.2.2 Fungsi Pajak.....	21
2.2.3 Jenis Pajak.....	21
2.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
2.2.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	23
2.2.6 Sanksi Perpajakan .....	25
2.2.7 Tingkat Pendapatan.....	25
2.2.8 Pemahaman Pajak.....	26
2.2.9 Kesadaran Wajib Pajak.....	27
2.2.10 Penunggakan Pajak .....	28
2.3 Kerangka Konseptual .....	29
2.4 Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Gambaran Objek Penelitian.....	34
3.2 Populasi dan Sampel .....	34
3.2.1 Populasi.....	34
3.2.2 Sampel .....	34
3.3 Jenis Penelitian .....	36

3.4	Identifikasi Variabel Penelitian .....	36
3.5	Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	36
3.6	Metode Pengumpulan Data .....	39
3.7	Metode Analisis Data .....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		47
4.1	Hasil Penelitian.....	47
4.1.1.	Data Responden .....	47
4.1.2	Deskripsi Variabel .....	52
4.2	Analisis Hasil Penelitian .....	61
4.2.1.	Hasil Uji Instrumen.....	61
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	63
4.2.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	66
4.2.4	Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	69
4.2.5	Uji Hipotesis .....	70
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian .....	73
BAB V PENUTUP.....		80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Implikasi .....	81
5.3	Saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....		84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		86

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan di Kabupaten Banyuwangi 2019-2023.....	3
Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak Yang Belum Membayar Pajak.....	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2. 2 Variabel Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Tahun Menunggu Pajak.....	48
Tabel 4. 3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	49
Tabel 4. 4 Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	49
Tabel 4. 5 Responden Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 4. 6 Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan .....	51
Tabel 4. 7 Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan.....	51
Tabel 4. 8 Deskripsi Variabel Sanksi Pajak .....	52
Tabel 4. 9 Deskripsi Variabel Tingkat Pendapatan.....	54
Tabel 4. 10 Deskripsi Variabel Pemahaman Pajak .....	56
Tabel 4. 11 Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak .....	58
Tabel 4. 12 Deskripsi Variabel Penunggakan Pajak .....	60
Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas Data .....	61
Tabel 4. 14 Hasil Uji Reliabilitas Data .....	63
Tabel 4. 15 Hasil Uji Normalitas .....	64
Tabel 4. 16 Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
Tabel 4. 17 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	66
Tabel 4. 18 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	67
Tabel 4. 19 Hasil Koefisien Determinasi .....	69
Tabel 4. 20 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	70
Tabel 4. 21 Hasil Uji Simultan.....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor .....	2
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	29



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuisisioner Penelitian
2. Data Responden
3. Tabulasi
4. Hasil Uji Validitas
5. Hasil Uji Reliabilitas
6. Hasil Uji Normalitas
7. Hasil Uji Multikolinearitas
8. Hasil Uji Heteroskedastisitas
9. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
10. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )
11. Dokumentasi



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kurang optimalnya pemasukan pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga ditunjukkan berdasarkan berita bahwa capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2023 hanya mencapai 52,44% dari target dan masih ada sekitar 44,56% yang belum terealisasi. Hal ini berarti banyak masyarakat Provinsi Jawa Timur yang belum lunas dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri pada tahun 2023 terdapat 78.907 individu yang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor..

Keterlambatan menyetor pajak kendaraan bermotor ditimbulkan dari sejumlah alasan. Salah satunya yaitu sanksi pajak, dengan memberlakukan sanksi pajak yang adil dan tegas mulai dari yang ringan hingga yang berat diharapkan dapat menurunkan penunggakan pajak. Selain itu terdapat faktor lain seperti tingkat pendapatan. ini disebabkan oleh pendapatan dari masing- masing pribadi, bergantung dari jenis usaha dan pekerjaan yang dijalankan. Pemahaman pajak juga menjadi salah satu komponen yang memengaruhi penunggakan pajak. Individu yang kurang memahami dengan jelas peraturan perpajakan cenderung tidak patuh. Penunggakan pajak kendaraan bermotor juga bergantung dari sudut pandang masing-masing individu. Sebagian masyarakat belum sadar akan kewajiban membayar pajaknya.

Fokus riset ini untuk mempelajari dampak sanksi pajak, tingkat pendapatan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Jenis data dalam riset ini adalah metode kuantitatif dengan menerapkan data langsung yang didapatkan dengan distribusi kuisioner dan data sekunder dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Banyuwangi. Sampel pada riset ini yakni wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi yang pernah menunggak pajak pada tahun 2019-2023 berjumlah 100 Partisipan yang dihitung menggunakan rumus slovin. Metode sampling insidental digunakan dalam proses pengambilan sampel serta menggunakan analisis regresi linier berganda.

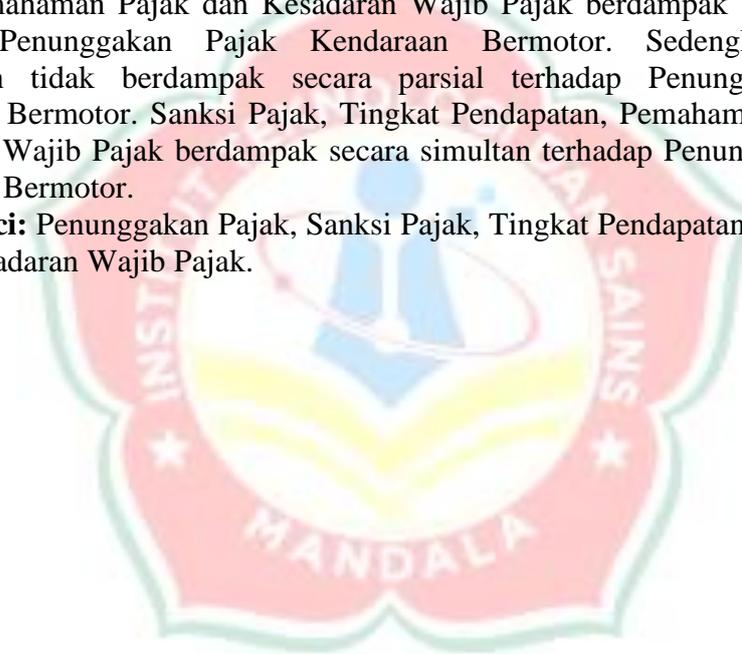
Pengujian dalam riset ini membuktikan bahwa (1) sanksi pajak berdampak secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor, (2) tingkat pendapatan tidak berdampak secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor, (3) pemahaman pajak berdampak secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor, (4) kesadaran wajib pajak berdampak secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor, (5) sanksi pajak, tingkat pendapatan, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak berdampak secara simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Disarankan individu yang belum membayar pajaknya tepat waktu, akan lebih tertarik untuk membayar pajaknya. Karena adanya SAMSAT Drive Thru, SAMSAT Keliling bahkan E-samsat telah mempermudah ketika melakukan pembayaran pajak. Riset yang akan datang disarankan agar mempertimbangkan elemen-elemen lain yang turut memengaruhi penunggakan pajak kendaraan bermotor seperti sosialisasi pajak kendaraan bermotor di setiap daerah

## ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk menilai dampak Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuwangi. Riset ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisisioner dan data sekunder yang dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Banyuwangi. Sampel studi mencakup 100 orang si Kabupaten Banyuwangi yang pernah menunggak pajak pada tahun 2019-2023. Teknik sampling insidental digunakan untuk pengambilan sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Temuan riset ini menegaskan bahwa Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berdampak secara parsial terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Tingkat Pendapatan tidak berdampak secara parsial terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berdampak secara simultan terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

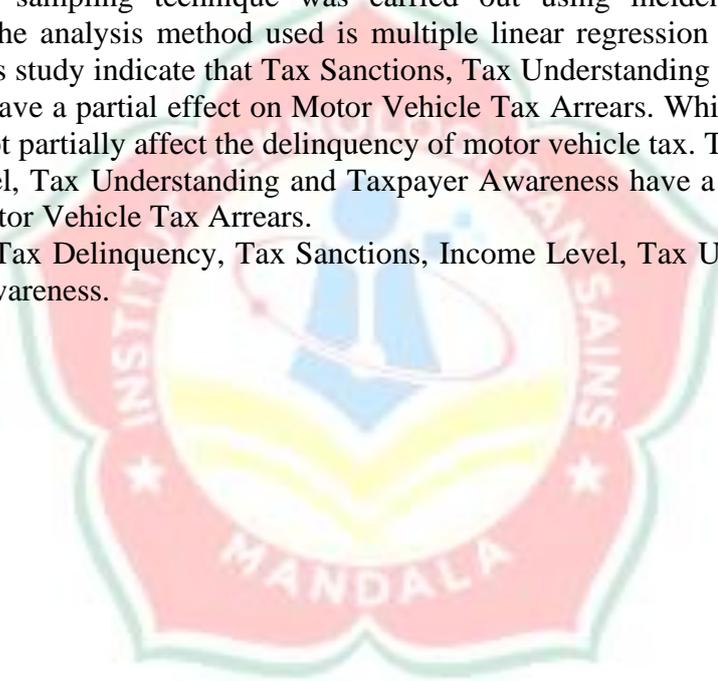
**Kata Kunci:** Penunggakan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.



## ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Tax Sanctions, Income Level, Tax Understanding and Taxpayer Awareness on Motor Vehicle Tax Arrears in Banyuwangi Regency. The type of data used in this study is a quantitative method using primary data obtained through distributing questionnaires and secondary data obtained from the Banyuwangi Regional Revenue Service Technical Implementation Unit. The population of this study is motor vehicle taxpayers in Banyuwangi Regency who have been in tax arrears in 2019-2023 totaling 100 people. The sampling technique was carried out using incidental sampling technique. The analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that Tax Sanctions, Tax Understanding and Taxpayer Awareness have a partial effect on Motor Vehicle Tax Arrears. While the income level does not partially affect the delinquency of motor vehicle tax. Tax Sanctions, Income Level, Tax Understanding and Taxpayer Awareness have a simultaneous effect on Motor Vehicle Tax Arrears.

**Keywords:** Tax Delinquency, Tax Sanctions, Income Level, Tax Understanding, Taxpayer Awareness.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

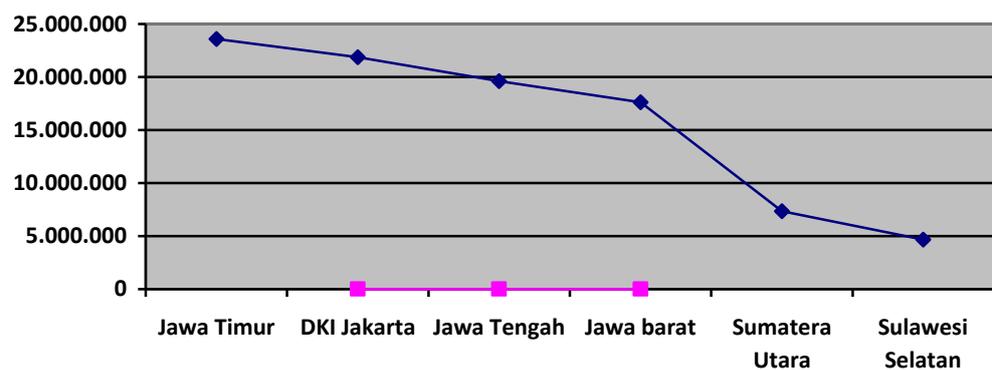
### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak terbagi 2 kategori yaitu pajak pusat dan pajak daerah, tergantung pada instansi yang mengumpulkannya. Pajak yang dikumpulkan untuk mendanai kebutuhan anggaran negara disebut sebagai pajak pusat, sedangkan untuk mendanai kebutuhan lokal disebut pajak daerah (Mardiasmo, 2016).

Salah satu jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah regional yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Gubernur Jawa Timur menegaskan capaian perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2023, saat ini telah mencapai Rp 3.607.712.840.734 atau telah terpenuhi sebesar 52,44% dari target dan masih ada sekitar 44,56% yang belum terealisasi (Hakim, 2023).

Hal ini berarti, masih banyak masyarakat Jawa Timur belum membayar pajaknya tepat waktu. Jumlah kendaraan bermotor sendiri di Indonesia per 3 Januari 2023 telah mencapai 152.565.905 unit. Angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan total kendaraan bermotor pada tahun 2020 yaitu sebanyak 136.137.451 unit dikutip dari berita *Cable News Network* Indonesia (CNN Indonesia). Berikut merupakan data jumlah kendaraan bermotor terbanyak se-Indonesia pada tahun 2022.

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor Terbanyak se Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan gambar 1.1 mengenai jumlah kendaraan bermotor diatas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan akumulasi kendaraan bermotor terbanyak se Indonesia (Agnez, 2023). Hal ini mengindikasi total individu pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur meningkat. Provinsi Jawa Timur mencakup dari beberapa Kabupaten satu di antaranya yaitu Kabupaten Banyuwangi.

Berikut terdapat data jumlah kendaraan bermotor di Banyuwangi dari tahun 2019-2023.

**Tabel 1. 1Jumlah Kendaraan di Kabupaten Banyuwangi 2019-2023.**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah kendaraan</b>
<b>2019</b>	567.185
<b>2020</b>	559.894
<b>2021</b>	544.693
<b>2022</b>	539.447
<b>2023</b>	539.134

*Sumber: Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Banyuwangi (2019-2023).*

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa kuantitas kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami penurunan dari tahun 2019-2023. Hal tersebut di karenakan adanya pandemi pada tahun 2020 sehingga tingkat daya beli masyarakat Banyuwangi semakin rendah serta banyak kendaraan bermotor yang dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (koekoe, 2024). Karena adanya pandemi yang terjadi pada tahun 2020 tidak berkemungkinan bahwa banyak masyarakat yang menunggak membayar pajak kendaraannya.

Tunggakan pajak adalah pembayaran pungutan yang belum dibayar sampai batas waktu jatuh tempo. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam studi (Situmeang, 2023) salah satunya, yaitu sanksi pajak berdampak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan berfungsi untuk menjamin bahwa norma perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan akan dipatuhi (Mardiasmo,

2016). Sanksi dibutuhkan untuk memberikan pelajaran atau hukuman kepada mereka yang melanggar aturan pajak. Memberlakukan sanksi yang merata dan lugas terhadap setiap pelanggaran aturan, mulai dari yang ringan hingga yang berat dapat mengurangi penunggakan pajak.

Selain konsekuensi pajak, tingkat pendapatan juga dapat berdampak pada keterlambatan membayar pajak. Penelitian oleh (Tangoy et al., 2023) menegaskan tingkat pendapatan memengaruhi penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini disebabkan karena pendapatan setiap orang bervariasi tergantung dengan usaha atau pekerjaannya. Individu yang tidak memiliki kebutuhan mendesak yang dapat mempengaruhi keputusan untuk membayar pajak, individu dengan pendapatan tinggi cenderung lebih patuh membayar kewajibannya. Disisi lain, individu dengan pendapatan renda mungkin lebih sulit untuk membayar pajaknya tepat waktu karena memiliki kebutuhan pokok yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Akibatnya, kemungkinan penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan meningkat seiring dengan penurunan pendapatan setiap individu.

Faktor lain yang menyebabkan penunggakan pajak kendaraan bermotor adalah bagaimana seseorang memahami regulasi perpajakan mencerminkan pemahaman tentang ketentuan yang berlaku. Jika seseorang tidak paham peraturan perpajakan secara menyeluruh, berkemungkinan akan kurang patuh. Seseorang dapat menunda pemabayaran pajak karena

tidak memahami regulasi perpajakan (Ikhsan, 2016 dalam Alfiani & Subadriyah, 2018)

Penunggakan pajak kendaraan bermotor juga bergantung dari pandangan masing-masing wajib pajak. Masyarakat saat ini belum benar-benar mengerti peranan dan manfaat pajak. Beberapa masyarakat juga masih belum menyadari kewajiban mereka untuk membayar pajak. Tingkat kesadaran dapat dinilai dari kesungguhan untuk memenuhi kewajibannya tercermin dari persepsi perpajakan dan keseriusannya dalam melunasi dan melaporkan pajak (Febriyanti dan Setiawan, 2017).

Saat melakukan pelunasan pajak kendaraan bermotor masyarakat akan membayar di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) terdekat dari tempat tinggal. Pada Kabupaten Banyuwangi sendiri terdapat 2 Kantor SAMSAT yaitu Kantor SAMSAT Banyuwangi dan Kantor SAMSAT Benculuk. Berikut merupakan data nominal wajib pajak yang belum melakukan pelunasan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Banyuwangi

**Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak Yang Belum Membayar Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019-2023.**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah kendaraan bermotor (unit)</b>	<b>Jumlah kendaraan bermotor yang belum membayar pajak (unit)</b>
<b>2019</b>	567.185	64.999
<b>2020</b>	559.894	88.872
<b>2021</b>	544.693	80.318
<b>2022</b>	539.447	77.339
<b>2023</b>	539.134	78.907

*Sumber: Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Banyuwangi (2019-2023)*

Berdasarkan tabel 1.2 mengindikasikan bahwa kuantitas individu yang belum membayar pajak kendaraan bermotor tertinggi berada di tahun 2020 hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Pada tahun berikutnya jumlah yang menunggak pajak terus menurun dan pada tahun 2023 akumulasi kendaraan yang belum membayar pajak meningkat kembali. Meskipun akumulasi kendaraan bermotor yang menunggak pajak mengalami penurunan namun jumlah tersebut masih belum menyentuh angka sebelum adanya pandemi COVID-19. Tentunya banyak hal yang dapat mempengaruhi adanya penunggakan tersebut.

Berdasarkan studi sebelumnya oleh (Situmeang, 2023) sanksi pajak berdampak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor karena denda yang tegas terhadap pelanggar pajak dapat membuat wajib pajak takut dalam menunggak. Selain itu, tingkat pendapatan berdampak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor karena individu yang berpenghasilan rendah akan dipengaruhi oleh kebutuhan pokok yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Penunggakan pajak juga dapat dipengaruhi oleh

kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait perpajakan serta masyarakat yang masih belum menyadari kewajiban untuk melunasi pajak kendaraan bermotor.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kantor Samsat merupakan tempat dimana pemilik kendaraan dapat mendaftarkan kendaraannya dan membayar pajak kendaraan tahunan. Berdasarkan tabel 1.2 dapat ditetapkan bahwa total individu yang tidak melunasi pajak masih banyak. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa hal yang berdampak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor yaitu sanksi pajak, tingkat pendapatan, pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak. Dari permasalahan tersebut, sehingga dirumuskan permasalahan berikut ini:

1. Apakah sanksi pajak berdampak secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah tingkat pendapatan berdampak secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah pemahaman pajak berdampak secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor ?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berdampak secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor ?

5. Apakah sanksi pajak, tingkat pendapatan, pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berdampak secara simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dikemukakan , maka arah pengkajian ini adalah:

1. Meninjau dampak sanksi pajak secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.
2. Meninjau dampak tingkat pendapatan secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.
3. Meninjau dampak pemahaman pajak secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.
4. Meninjau dampak kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.
5. Meninjau dampak sanksi pajak, tingkat pendapatan, pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Daerah

Harapan penelitian ini adalah untuk membantu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam peningkatan perolehan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan menentukan kebijakan dalam masalah penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

## 2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan riset ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang membuat wajib pajak mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan.

## 3. Bagi Akademisi

Harapannya jika peneliti lain dalam bidang perpajakan dapat menggunakan penelitian ini menjadi referensi. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan keustakaan dan sebagai bahan evaluasi bagi mahasiswa prodi akuntansi.

## 4. Bagi Peneliti

Memperluas pemahaman mengenai pajak kendaraan bermotor serta komponen yang berkontribusi dalam penundaan pembayaran oleh individu.

### **1.5 Batasan Masalah**

Untuk menjaga fokus dan relevan pembahasan dalam penelitian ini , maka dibuatlah batasan riset sebagai berikut:

1. Riset dilaksanakan pada Kabupaten Banyuwangi di Kantor Unit Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Banyuwangi.
2. Sampel penelitian ini hanya individu yang memiliki kendaraan bermotor dan berdomisili di Kabupaten Banyuwangi.

3. Individu di Kabupaten Banyuwangi yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 hingga 2023 adalah subjek dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penulis menggunakan temuan studi sebelumnya yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian ini. Studi yang dijadikan acuan yaitu: Situmeang, (2023) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan”. Studi ini mengaplikasikan metode kuantitatif. Hasil studi adalah kesadaran PKB, pengetahuan PKB, sosialisasi PKB dan sanksi PKB berdampak secara bersamaan terhadap Penunggakan PKB variabel kesadaran PKB, pengetahuan PKB, sosialisasi PKB dan sanksi PKB berdampak secara signifikan terhadap Penunggakan PKB di Kota Batam.

Tangoy et al., (2023) dengan topik “Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Manado”. Menggunakan metode kuantitatif. Hasil studi adalah menunggak pajak kendaraan bermotor terpengaruh oleh tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kualitas pelayanan, akan tetapi tingkat kesadaran tidak memiliki dampak terhadap tunggakan PKB.

Bhagaskara et al., (2023) bertopik “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi)”. Reviewnya menggunakan metode kuantitatif

serta jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif. Hasil studi adalah kepatuhan wajib kendaraan bermotor pajak secara parsial dan bersama-sama dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan E-samsat.

Wardati & Pattisahusiwa (2022) berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)”. Metode kuantitatif dikenakan dalam studi ini. Review riset ini adalah pemahaman pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan secara parsial memiliki dampak negatif pada tunggakan pajak.

Barlan et al., (2021) bertema “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Polewali Mandar”. Studi ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif. Hasil pengkajian pada riset ini adalah variabel Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak signifikan pada kepatuhan wajib pajak sementara itu variabel Tingkat Pendapatan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Isnaini & Karim, (2021) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)”. Studi ini mengaplikasikan metode kuantitatif. Review pengkajian ini adalah kesadaran serta sanksi perpajakan berdampak positif dan krusial pada kepatuhan wajib pajak kantor Samsat Kabupaten Gowa.

Amri et al., (2020) berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa”. Pengkajian ini mengaplikasikan Jenis Penelitian Kuantitatif. Menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berdampak. Namun variabel sosialisasi perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.

Widajantie & Anwar, (2020) dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kndaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan)”. Kategori penelitian ini yaitu kuantitatif. Pengkajian ini menegaskan bahwa di Kantor SAMSAT Surabaya Selatan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terdampak oleh program pemutihan pajak, kesadaran dan kualitas pelayanan. Namun, sosialisasi pajak tidak berdampak pada kepatatuhan wajib pajak di tempat tersebut.

Oktavia et al, (2019) berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus: Kecamatan Tunggal Ilir)”. Riset ini menggunakan analisi deskriptif untu menganalisis data dan model analisis regresi. Pengkajian ini menegaskan bahwa Umur berpengaruh positif dan berdampak, akan tetapi

tingkat pendidikan, pendapatan, dan sistem pelayanan pajak berdampak negatif pada tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Tunggal Ilir. Umur, tingkat pendapatan, pendidikan dan sistem pelayanan pajak secara bersamaan memengaruhi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Tunggal Ilir.

Alfiani & Subadriyah (2018) dengan judul “Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara”. Instrumen analisis yang dipergunakan yaitu analisis kuantitatif. Riset ini menegaskan statistik t variabel kesadaran, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan dan pendidikan berdampak negatif. Variabel pendapatan, kelalaian dan pemahaman pajak mempunyai pengaruh positif. Variabel kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan, kelalaian, pendidikan dan pemahaman pajak bersamaan memengaruhi penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

**Tabel 2. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Situmeang et al., (2023)	hasil dari riset ini adalah kesadaran PKB, pengetahuan PKB, sosialisasi PKB serta sanksi PKB berpengaruh secara simultan terhadap Penunggakan PKB variabel kesadaran PKB, pengetahuan PKB dan sosialisasi PKB dapat	Variabel pemicu: kesadaran pajak dan sanksi pajak Variabel efek: penunggakan pajak kendaraan berm Metode	Variabel bebas: pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak Tempst penelitian

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		berdampak terhadap Penunggakan PKB di Kota Batam.	Analisis Data: Analisi regresi linier berganda	
2.	Juwita Aliyah T, dkk  (2023)	hasil studi adalah menunggak pajak kendaraan bermotor terdampak oleh tingkat pendapatan masyarakat serta tingkat kualitas pelayanan, sementara itu tingkat kesadaran tidak terdampak pengaruh terhadap tunggakan PKB.	Variabel pemicu: tingkat pendapatan dan tingkat kesadaran Variabel efek: tunggakan pajak	Variabel pemicu: tingkat kualitas pelayanan Metode analisis data: analisis deskriptif Objek penelitian
3.	Bhagaskara et al.,  (2023)	Hasil riset adalah tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan E-samsat berdampak parsial dan simultan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Variabel pemicu: tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak	Variabel pemicu: kepatuhan wajib pajak Jenis penelitian: deskriptif kuantitatif Objek penelitian
4.	Wardati & Pattisahusiwa,  (2022)	hasil studi adalah pemahaman pajak berdampak negatif dan krusial pada tunggakan pajak. Sanksi perpajakan berdampak negatif dan krusial pada tunggakan pajak. Kualitas pelayanan	Variabel pemicu: pemahaman pajak dan sanksi pajak Variabel efek: tunggakan pajak Metode	Variabel pemicu: kualitas pelayanan Teknik pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> Objek

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		pajak berdampak negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak.	analisis data: regresi linier berganda	penelitian Tahun penelitian
5.	Barlan et al., (2021)	hasil studi ini adalah variabel Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak berdampak krusial terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi variabel Tingkat Pendapatan tidak krusial berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel pemicu: sanksi perpajakan dan tingkat pendapatan Pendekatan analisis data: regresi linier berganda	Variabel pemicu: pengetahuan pajak Variabel efek: kepatuhan wajib pajak Objek penelitian Tahun penelitian
6.	Isnaini & Karim, (2021)	hasil riset ini adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berdampak positif dan krusial pada kepatuhan wajib pajak kantor Samsat Kabupaten Gowa.	Variabel pemicu: kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan Pendekatan analisis data: regresi linier berganda	Variabel pemicu: kepatuhan wajib pajak Objek penelitian Tahun penelitian
7.	Amri et al., (2020)	hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten	Variabel pemicu: kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak Pendekatan analisis data: regresi linier berganda	Variabel pemicu: pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan Variabel efek: kepatuhan pajak

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Sumbawa. Sementara itu variabel sosialisasi perpajakan tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.		Objek penelitian Tahun penelitian
8.	Widajantie & Anwar, (2020)	hasil dari studi ini adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, sosialisasi pajak tidak memiliki dampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.	Variabel pemicu: kesadaran wajib pajak	Variabel pemicu: program pemutihan pajak, sosialisasi pajak dan pelayanan pajak Variabel efek: kepatuhan wajib pajak Objek penelitian Tahun penelitian
9.	Oktavia et al., (2019)	hasil riset ini adalah Umur (U) berdampak positif pada tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, selain itu tingkat pendidikan (TP), pendapatan (P), serta sistem pelayanan pajak (SP) berdampak negatif dan signifikan pada tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel pemicu: tingkat pendapatan Variabel efek: tunggakan pajak Metode analisis data: regresi linier berganda	Variabel pemicu: umur, tingkat pendidikan dan sistem pelayanan Objek penelitian Tahun penelitian

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		di Kecamatan Tungal Ilir, baik bersama-sama maupun parsial.		
10.	Alfiani & Subadriyah, (2018)	hasil studi adalah statistik t variabel kesadaran, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan dan pendidikan berdampak negatif. Variabel pendapatan, kelalaian serta pemahaman pajak mempunyai pengaruh positif.. Berdasarkan uji f variabel kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan, kelalaian, pendidikan dan pemahaman pajak secara bersama-sama berdampak terhadap pnunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.	Variabel pemicu: pemahaman pajak Variabel efek: penunggakan pajak Metode analisis data: analisi linier berganda	Variabel pemicu: jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan, kesadaran pendidikan Objek penelitian Tahun penelitian

*Sumber: Google scholar, 2024*

**Tabel 2.2 Variabel Penelitian terdahulu**

No	Nama peneliti	X1	X2	X3	X4
1.	Situmeang et al, 2023	√			
2.	Tangoy et al., 2023		√		√
3.	Bhagaskara et al., 2023		√		√
4.	Wardati & Pattisahusiwa, 2022	√		√	
5.	Barlan et al., 2021	√	√		
6.	Isnaini & Karim, 2021	√			√
7.	Amri et al., 2020	√			√
8.	Widajantie & Anwar, 2020				√
9.	Oktavia et al., 2019		√		
10.	Alfiani & Subadriyah, 2018		√	√	√
Jumlah		5	5	2	6

*Sumber: Data diolah, 2024*

Berdasarkan tabel 2.2 mengindikasikan bahwa dari 10 riset terdahulu yang digunakan sebagai referensi, persamaan variabel sanksi pajak yang di teliti sebanyak 5, tingkat pendapatan sebanyak 5, pemahaman pajak sebanyak 2 dan kesadaran wajib pajak sebanyak 6.

Terdapat ketidaksamaan antara penelitian ini dengan riset sebelumnya seperti variabel independen yang di teliti yaitu Sanksi Pajak ( $X_1$ ), Tingkat Pendapatan ( $X_2$ ), Pemahaman Pajak ( $X_3$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ). Variabel dependen dalam studi ini jarang digunakan oleh penelitian terdahulu, kebanyakan riset terdahulu menggunakan variabel respon kepatuhan wajib pajak sedangkan penunggakan pajak dijadikan variabel respons.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke- empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2016) pajak adalah kontribusi dari masyarakat pada perbendaharaan pemerintah yang didasarkan undang-undang (bersifat wajib) digunakan untuk membiayai pengeluaran publik tanpa menerima kompensasi langsung yang dapat ditunjukkan.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Sihombing & Alestiana (2020) Pajak adalah sumbangan wajib dari rakyat untuk negara sesuai ketentuan hukum. Kontribusi ini dapat dipaksakan dan tidak diiringi dengan imbalan langsung yang bisa diterima atau digunakan untuk membiayai pengeluaran publik.

Seluruh pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan dan penyediaan layanan publik didanai oleh pajak

sebagai sumber pendapatan utama. (Anshori, 2021) dalam (Situmeang, 2023)

### 2.2.2 Fungsi Pajak

(Mardiasmo, 2016) menjelaskan terdapat 2 peran pajak yaitu:

1. Peran anggaran (*budgetair*)

sebagai sumber dana untuk pembiayaan pemerintah.

2. Peran mengendalikan (*cregulerend*)

Memiliki peranan untuk menjadi salah satu saran pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekonomi dan sosial.

Contoh:

- a) Tarif pajak yang besar diterapkan dengan tujuan mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) barang-barang mewah tersebut di kenakan tarif pajak yang tinggi dengan tujuan mengurangi kebiasaan hidup boros dalam pengeluaran.

### 2.2.3 Jenis Pajak

Menurut buku perpajakan (Mardiasmo, 2016) ada 3 jenis pajak yaitu:

1. Menurut kelompoknya

- a) Pajak langsung: pungutan hanya boleh dibayarkan oleh individu tersebut.

Contoh: PPH .

- b) Pajak tidak langsung: iuran bisa diberikan kepada orang lain pada akhirnya.

Contoh: PPN.

## 2. Dari sudut sifatnya

- a) Pajak Subjektif: pungutan yang berlandaskan subjeknya, dengan mempertimbangkan keadaan individu.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Objektif: iuran yang didasarkan pada bagiannya, tanpa adanya memperhitungkan kondisi dari individu.

Contoh: PPN dan PPnBM.

## 3. Instansi yang mengumpulkan

- a) Pajak pusat: pungutan dikumpulkan melalui negara untuk memenuhi kebutuhan anggaran.
- b) Pajak Daerah: iuran dipungut melalui Pemerintah Regional serta di pakai untuk mendanai pengeluarannya.

### **2.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaran bermotor merupakan jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa

atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya *energy* tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Subjeknya adalah entitas hukum/individu yang mempunyai kendaraan, dan objeknya adalah kendaraan itu sendiri.

### **2.2.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2022, biaya yang berlaku untuk masing-masing kategori pajak sebagai berikut:

1. Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebesar:
  - a. 1,5 % (satu koma lima persen) bagi kepemilikan pertama kendaraan pribadi dan badan;
  - b. 1% (satu persen) buat kendaraan angkutan umum;
  - c. 0,5% (nol koma lima persen) bagi kendaraan ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan/atau keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan pemerintah daerah.
2. Harga Bea Balik Nama Kenaraan Bermotor (BBNKB) dideklarasikan sebagai berikut:

- a. pemberian pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
  - b. penyaluran kedua dan berikutnya sebesar 1% (satu persen);
  - c. ubah bentuk/ubah mesin sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
3. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, lembaga sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan yang didukung akte pendirian atau surat keterangan dari instansi yang berwenang;
4. Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk sosial keagamaan, lembaga sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:
- a. tidak termasuk kategori kendaraan jenis sedan dan jeep;
  - b. khusus kendaraan jenis Minibus, nilai Nilai Jual Kendaraan bermotor (NJKB) dibawah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta).
5. Tarif BBNKB Kendaraan Listrik ditetapkan sebagai berikut:
- a. penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - b. pengukuhan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

### **2.2.6 Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai agunan peraturan perpajakan ditaati. Dengan demikian, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah yang membantu individu menghindari melakukan pelanggaran peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Ada dua jenis sanksi yang di atur oleh undang-undang. Berikut perbedaan dari keduanya:

1. Sanksi administrasi berarti mengembalikan ganti rugi negara, biasanya dalam bentuk bunga dan penalti.
2. Fiskus menggunakan sanksi pidana sebagai sarana terakhir untuk memastikan peraturan pajak dipatuhi.

Menurut Rois dan Fadjrih (2022) dalam Adawiyah et al, (2023) sanksi pajak dimaksudkan untuk mencegah melanggar peraturan dan digunakan untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban. Sanksi pajak sangat penting dan harus selalu diterapkan secara tegas.

### **2.2.7 Tingkat Pendapatan**

Pendapatan biasanya didefinisikan sebagai semua uang yang diterima masyarakat atau negara dari semua kegiatan, baik yang dilakukan maupun yang tidak. (Ramadan Anggia, Radlyan Rahim, 2023). Dalam buku yang berjudul Teori Pendapatan (Ramadan

Anggia, Radlyan Rahim, 2023) menurut BPS, golongan perolehan penduduk dibedakan menjadi 4 yaitu

1. Kategori perolehan yang sangat tinggi memiliki *mean* lebih dari Rp 3.500.000 tiap bulan.
2. Kategori perolehan tinggi memiliki *mean* antara Rp 2.500.000 Rp 3.500.000 tiap bulan.
3. Kategori perolehan sedang memiliki *mean* antara Rp 1.500.000 Rp 2.500.000 tiap bulan
4. Kategori perolehan rendah memiliki *mean* kurang dari Rp 1.500.000 tiap bulan.

### **2.2.8 Pemahaman Pajak**

Menurut Sudijono (2013) dalam Meutiaa et al, (2021) pemahaman adalah keandalan individu dalam memahami hal setelah diingat dan dipelajari. Pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan adalah teknik individu memaknai peraturan perpajakan. Semakin memahami individu pada peraturan perpajakan, kian paham pula pada tanggungan mereka.

Pemahaman aturan perpajakan adalah tahapan individu memaknai aturan perpajakan dan mengimplementasi dalam rangka memnuhi kewajiban untuk membayar pajak (Alfiani & Subadriyah, 2018). Jika seseorang sudah paham mengenai perpajakan maka bisa

menyebabkan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Berikut beberapa komponen penentu pemahaman pajak adalah:

1. Kewajiban kepemilikan kendaraan bermotor: Orang yang memiliki kendaraan bermotor harus menyampaikan SPPKB dan membayar pajak.
2. Mengetahui pedoman dan tahapan dasar perpajakan, termasuk memahami perhitungan PKB, sistem pemungutan pajak, masa pajak, cara mengajukan SPPKB, dan sebagainya. Memahami peran pajak, wajib pajak harus mengetahui fungsi dari pemungutan pajak yang diterapkan.

### **2.2.9 Kesadaran Wajib Pajak**

Membayar pajak adalah bagian dari menjadi warga negara. Tingkat kesadaran warga negara berkorelasi positif dengan moralitas perpajakan yang tinggi. Mereka yang memiliki kesadaran tinggi cenderung sangat memperhatikan apa yang mereka lakukan, yang membuat perhatian mereka lebih terorganisir dan fokus. Sebaliknya, mereka yang memiliki kesadaran rendah cenderung kurang terorganisir dan mudah terpecah (Alfiani & Subadriyah, 2018).

Kesadaran bagi individu adalah individu atas kesadaran sendiri menunaikan tanggung jawab perpajakannya misalnya mendaftarkan diri, menjumlah, melunasi, dan mengadakan keseluruhan pajak

tanggungannya (Suandy, 2011 dalam (Widajantie & Anwar, 2020). Keadaan di mana wajib pajak memahami dan menyadari makna, manfaat, dan sasaran pelunasan pajak kepada negara disebut kesadaran wajib pajak. Tingkat kesadaran yang besar berdampak positif dengan peningkatan kepatuhan pajak, karena kesadaran ini mendorong peningkatan kepatuhan pajak (Rahayu, 2017).

### **2.2.10 Penunggakan Pajak**

Dalam undang-undang no.11 Tahun 2016 Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

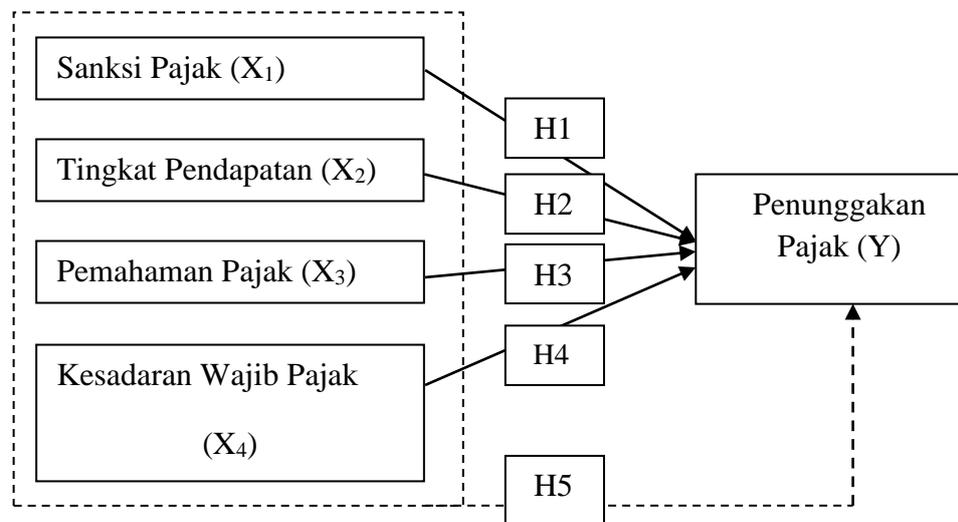
Tunggakan adalah individu yang gagal membayar pajaknya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan Rosidi, (2013) dalam Alfiani & Subadriyah, (2018). Menurut Nasution, (2016) dalam Tangoy et al, (2023) Tunggakan pajak kendaraan bermotor

mencakup pembayaran yang termasuk denda administratif seperti bunga, penalti, atau peningkatan

yang disebutkan dalam Surat Ketetapan Pajak atau dokumen serupa.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk menjelaskan akar pemikiran dalam penelitian ini, sehingga dapat dibuat sebuah kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Penjelas :

—————> : Uji Parsial

- - - - -> : Uji Simultan

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah respon awal dari perumusan masalah, sehingga bersifat “sementara” dan harus diuji dengan data empiris yang dikumpulkan. (Sugiyono, 2020).

### 1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai proteksi bahwa peraturan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Denda pajak membantu individu menghindari melanggar aturan yang di sahkan. (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan rujukan penelitian yang dilakukan oleh Algon Neo Situmeang dan Poniman (2023) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berperan pada penunggakan pajak kendaraan bermotor. Maka asumsi pertama adalah:

**H1 : Terdapat pengaruh sanksi pajak secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor**

### 2. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Secara umum pendapatan diartikan sebagai semua penerimaan masyarakat atau negara dari semua kegiatan yang dilakukan maupun kegiatan yang tanpa dilakukan (Ramadan Anggia, Radlyan Rahim, 2023). Pendapatan dari setiap orang bervariasi berjalan lurus dengan usaha . Wajib pajak dengan pendapatan tinggi cenderung patuh dalam

membayar pajaknya karena dengan memiliki pendapatan yang besar individu tidak memberikan pertimbangan terutama untuk membayar pajak (Bhagaskara, 2023). Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelaahan oleh Siska Alfiani dan Subadriyah (2018), Juwita Aliyah T, dkk (2023), mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan berdampak terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor. Maka dugaan kedua adalah:

**H2 : Terdapat pengaruh tingkat pendapatan secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor**

### **3. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemahaman pajak adalah tahapan individu memaknai dan mengetahui tentang peraturan yang telah dideklarasikan serta proses perpajakan dan mengimplementasikannya (Wardati & Pattisahusiwa, 2022). Tidak cukupnya wawasan dan pengetahuan terhadap perpajakan menciptakan masyarakat yang menunggak dalam membayar kewajibannya. Penelaahan yang dilakukan oleh Siska Alfiani dan Subadriyah (2018), membuktikan hasil pemahaman pajak berdampak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Maka dugaan ketiga adalah:

**H3 : Terdapat pengaruh pemahaman pajak secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.**

#### **4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor**

Kesadaran wajib pajak dimana kondisi individu memahami makna, peran maupun maksud pelunasan pajak pada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang meningkat mampu berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan pajak. (Rahayu, 2017). Eksplorasi yang dilakukan oleh Algon Neo Situmeang dan Poniman (2023), menunjukkan hasil kesadaran wajib pajak membawa dampak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Maka hipotesis keempat adalah:

**H4 : Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor**

#### **5. Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Pajak Dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak**

Eksplorasi oleh Algon Neo Situmeang dan Poniman (2023), memberikan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berdampak secara simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Kesadaran pajak, pendapatan, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan, kelalaian, pendidikan dan pemahaman pajak berpengaruh secara bersamaan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor Siska Alfiani dan Subadriyah (2018). Maka hipotesis kelima adalah:

**H5: Terdapat pengaruh sanksi pajak, tingkat pendapatan, pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Objek Penelitian**

Objek yang dikenakan skripsi ini adalah individu kendaraan bermotor (PKB) di Banyuwangi yang kewajiban pajaknya belum lunas pada tahun 2019-2023.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Dalam kajian ini adalah orang yang menunggak pajak kendaraan bermotor di Banyuwangi dari tahun 2019-2023. Nominal wajib pajak yang menunggak pajak pada tahun 2023 di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 78.907 wajib pajak, populasi digunakan untuk mengacu pada area umum yang mencakup subjek atau objek dengan jumlah dan ciri tertentu yang diputuskan peneliti untuk dipelajari, dengan demikian peneliti dapat membuat kesimpulan.(Sugiyono, 2020).

##### **3.2.2 Sampel**

Sampel ialah representasi dari kuantitas populasi, jadi jika populasi banyak dan peneliti tidak dapat mempelajarinya, peneliti dapat menerapkan sampel populasi untuk menyusun simpulan yang bisa diterapkan pada populasi secara menyeluruh. Jumlah sampel

penelitian harus benar-benar representatif, dan rumus slovin berikut dapat digunakan untuk menghitungnya:

$$n = N / ( 1 + N.( e )^2)$$

Keterangan:

n = Total Sampel

N = Total Populasi

E = Batas Toleransi Error

Kalkulasi sampel:

$$\begin{aligned} n &= 78.907 / (1+78.907.(10)^2) \\ &= 78.907 / (1+78.907.(0,1)^2) \\ &= 78.907 / (1+78.907.(0,01)) \\ &= 78.907 / (1+789,07) \\ &= 78.907 / 790,07 \\ &= 99,87 \text{ dibulatkan } 100 \end{aligned}$$

Teknik *purposive sampling* digunakan pada sampel ini yang artinya teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini memilih sekelompok subyek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai mempunyai keterkaitan dengan karakteristik dari populasi yang akan diteliti (Sugiyono, 2020).

Kriteria percontohan pada riset ini adalah:

1. Individu yang menunggak pelunasan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019-2023.

2. Wajib pajak yang berdomisili di Kabupaten Banyuwangi.

### **3.3 Jenis Penelitian**

Data langsung dan tidak langsung diterapkan pada penelitian kuantitatif ini. Data langsung didapatkan langsung dari responden via distribusi kuesioner, baik online maupun offline. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, referensi dari artikel ilmiah, dan analisis undang-undang perpajakan.

### **3.4 Identifikasi Variabel Penelitian**

Variabel-variabel yang di pakai pada riset ini antara lain:

1. *Independent Variabel* (variabel bebas)

Menurut Sugiyono (2020) variabel independen yaitu variabel prediktor yang menjadikan sebab munculnya variabel dependen (terikat).

Dari variabel independent pada riset ini ialah sanksi pajak ( $X_1$ ), tingkat pendapatan ( $X_2$ ), pemahaman pajak ( $X_3$ ) dan kesadaran wajib pajak ( $X_4$ ).

2. *Dependent Variabel* (variabel terikat)

Variabel tergantung dalam riset ini adalah penunggakan pajak ( $Y$ ).

### **3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **1. Variabel Bebas**

##### **a. Sanksi Pajak ( $X_5$ )**

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai agunan bahwa undang-undang perpajakan akan diikuti. Dengan arti lain denda perpajakan

berfungsi sebagai sarana pencegahan untuk menghindari pelanggaran (Mardiasmo, 2016).

Adam smith (Rahayu, 2017) ciri-ciri sanksi pajak adalah:

- a) Denda yang disampaikan kepada individu harus jelas.
- b) Denda perpajakan tidak boleh sewenang-wenang tanpa toleransi.
- c) Denda yang diberikan hendaklah proporsional.
- d) Denda tersebut harus memberikan efek jera secara langsung.

#### **b. Tingkat Pendapatan ( $X_2$ )**

Menurut Sari dan Susanti( 2015) dalam (Alfiani & Subadriyah, 2018) tingkat pendapatan adalah kemampuan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka dan tepat waktu dalam membayarnya. Untuk variabel ini, digunakan metrik berikut:

- a) Patuh membayar walaupun pendapatan rendah.
- b) Besaran tanggungan tidak jadi penghalang untuk melakukan pembayaran.
- c) mampu melunasi nominal pungutan yang dikenakan.
- d) Pendapatan yang diterima mencukupi kebutuhan pokok dan kewajiban.

Matrik tingkat pendapatan menggunakan riset dari (Farandy, 2018) dalam (Bhagaskara, 2023).

**c. Pemahaman Pajak (X<sub>3</sub>)**

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah tahapan individu memaknai aturan perpajakan dan mengimplementasikan itu untuk melunasi pajak (Alfiani & Subadriyah, 2018). Menurut Rukmana (2013) dalam (Alfiani & Subadriyah, 2018) menyimpulkan bahwa indikator pemahaman pajak adalah:

- a) Mengerti hak dan kewajiban wajib pajak.
- b) Memahami konsekuensi keterlambatan membayar.
- c) Mengalami kesulitan dalam mencerna tahapan membayar Pajak
- d) Mengetahui fungsi pajak yang dibayarkan.

**d. Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>4</sub>)**

Kesadaran ialah kondisi individu menyadari dengan baik tanggungjawabnya tanpa merasa terpaksa atau takut karena mereka menyadari dan memahami bahwa hukum mengatur perilaku tertentu Rukmana, (2013) dalam Alfiani & Subadriyah, (2018) . Indikator kesadaran perpajakan ditunjukkan dengan:

- a) Kontribusi individu pada negara.
- b) Keterlibatan dalam pembangunan daerah.
- c) Kesadaran dalam membuat anggaran pajak.
- d) Negara akan dirugikan karena pembayaran pajak yang tidak sesuai.
- e) Ditentukan oleh Undang-undang dan ditegakkan.

## 2. Variabel Terikat

### Penunggakan Pajak (Y)

Tunggakan pajak adalah orang yang gagal menuntaskan pajaknya di tanggal jatuh tempo (Rosidi, 2013 dalam (Alfiani & Subadriyah, 2018). Indikator dari Tunggakan Pajak adalah:

- a) Individu lalai dalam melunasi pajak kendaraan bermotor.
- b) Wajib pajak konsisten membayar melewati jatuh tempo.
- c) Individu yang melakukan tunggakan mendapatkan denda.
- d) Individu membayar setelah jatuh tempo.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Studi ini mengenakan data langsung dan tidak langsung. Dalam riset ini peneliti mendapatkan data dengan menerapkan metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Observasi

Menurut Sugiyono (2020), observasi adalah mengelompokkan data yang mengikutsertakan peninjauan langsung pada objek penelitian. Dalam observasi, peneliti secara aktif mengevaluasi dan mencatat perilaku, interaksi, atau situasi yang terjadi tanpa melakukan campur tangan yang signifikan. Observasi digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti dengan melihat langsung situasi atau konteks dimana fenomena tersebut terjadi. Dalam konteks riset ini, observasi dilaksanakan dengan proses melakukan pengamatan langsung di lapangan agar mendapatkan

pengetahuan yang unggul terkait kondisi sebenarnya pada wajib pajak kendaraan bermotor.

## 2. Metode Wawancara

Menurut Sugiyono (2020), wawancara merupakan salah satu cara pengambilan informasi yang penting. Ketika wawancara, peneliti melakukan interaksi langsung dengan partisipan untuk memperoleh informasi yang relevan terkait dengan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung atau lisan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan.

## 3. Metode Kuisioner

Menurut Sugiyono (2020), angket atau kuisioner adalah metode penghimpunan data yang mengikutsertakan penyampaian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis pada partisipan, yang diharapkan menjawab benar. Peneliti dalam hal ini menggunakan skala likert (1-5) dimana ukuran skalanya sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju	mendapatkan skor 5
ST = Setuju	mendapatkan skor 4
RG = Ragu-ragu	mendapatkan skor 3
TS = Tidak Setuju	mendapatkan skor 2
STS = Sangat Tidak Setuju	mendapatkan skor 1

#### 4. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka ialah cara penghimpunan data dalam penelitian yang dilaksanakan kemudian mengacu pada sumber-sumber informasi yang terdokumentasikan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan dan sumber-sumber lain yang relevan. Disini peneliti melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan variabel dan objek yang diteliti.

### 3.7 Metode Analisis Data

#### 1. Uji Instrumen

##### a. Uji Validitas

Instrumen yang tepat merujuk pada alat pengukur yang digunakan untuk memperoleh data dan dianggap valid jika pernyataan yang didalamnya dapat menggambarkan dengan baik. (Sugiyono, 2020). Suatu kuisisioner dikatakan dapat dipercaya apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .  $r_{tabel}$  diperoleh dari  $df = n - 2$  dengan tingkat *signifikansi* 90% atau  $\alpha$ : 10%, dimana:

$df = \text{degree of freedom}$

$n = \text{jumlah sampel}$

Dalam perhitungan uji validitas dari sebuah instrumen dapat menggunakan rumus korelasi *product moment* atau dikenal dengan korelasi *pearson*. Adapun rumus uji validitas, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)(N\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

N = jumlah sampel

x = butir skor

y = total butir skor

#### b. Uji Reliabilitas

Menjelaskan bahwa uji reliabilitas mengukur sejauh mana konsistensi hasil pengukuran yang dilakukan dengan mengaplikasikan objek yang sama sehingga dapat memperoleh data yang serupa Sugiyono, 2020. Dalam penelitian ini peneliti memilih 0,60 sebagai koefisien reliabilitasnya. Apabila nilai *Cronbach's alpha*  $\alpha > 0,60$  jadi instrumen tersebut reliabel atau terpercaya. Uji reliabilitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{\alpha \cdot r}{1 + (k - 1)r}$$

Rincian:

$\alpha$  = koefisien reliabilitas

r = korelasi antar item

k = jumlah item

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Digunakan agar memastikan variabel pengganggu pada model regresi memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal dianggap baik oleh uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*. Jika angka signifikan lebih tinggi dari 0,1 mengindikasikan bahwa data terdistribusi normal (Ghozali, 2013).

### b. Uji Multikolinearitas

Nilai Toleransi dan nilai Faktor Inflasi Variasi (VIF) menunjukkan uji multikolinearitas. Ini dipakai agar menentukan model regresi mendapati korelasi antara variabel bebas, atau variabel independen. Agar melihat adanya multikolinieritas bisa dilihat dari besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) yaitu dengan melihat nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$  (Ghozali, 2013).

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser, yang melibatkan regresi variabel independen terhadap nilai residual absolutnya, diterapkan supaya mengetahui apakah terjadi ketidakseragaman dalam varians residual antar peninjauan dalam model regresi. Pengambilan keputusan untuk uji glejser ialah jika angka signifikansi lebih dari 0,1 maka dapat ditentukan bahwa data tersebut tidak ada ketidakseragaman *variens*.  
Ghozali 2013

### 3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda, yang melibatkan satu variabel terikat dan dua variabel independen, adalah contoh paling umum dari model regresi berganda. (Sugiyono, 2020).

Persamaannya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Penunggakan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

$\alpha$  = Konstanta

B<sub>1</sub> = Estimasi regresi sanksi pajak

B<sub>2</sub> = Estimasi regresi tingkat pendapatan

B<sub>3</sub> = Estimasi regresi pemahaman pajak

B<sub>4</sub> = Estimasi regresi kesadaran wajib pajak

### 4. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menunjukkan persentase (%) dampak variabel bebas pada variabel tak bebas. Angka Parameter determinasi berkisar diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Potensi variabel bebas untuk menerangkan macam variabel tak bebas sangat terbatas, menurut nilai (R<sup>2</sup>). Persamaan untuk koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$R = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

Keterangan:

$R^2$  = Koefisien Determinasi

RSS = Residual *Sum of Square*

TSS = Total *Sum of Square*

## 5. Pengujian Hipotesis

### a. Uji-t (Parsial)

Untuk menjelaskan sampai seberapa berdampak variabel independen secara parsial, uji parsial ini digunakan. Nilai t dapat dihitung melalui tingkat signifikansi 0,1 atau 10% dan derajat kebebasan  $df = (n - k - 1)$ , di mana n adalah nominal sampel dan k adalah jumlah variabel. Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis bisa diketahui melalui tingkat signifikansi. Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,1 sehingga variabel independen secara parsial berdampak terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2013). Uji t dirumuskan sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{b}{Sb}$$

Rincian:

t = Nilai uji t

b = koefisien regresi

Sb = varians (*variance*) dari *standard error*

**b. Uji-F (Simultan)**

Diterapkan agar menentukan apakah setiap variabel independen dalam model mempengaruhi variabel dependen atau terikat secara kolektif (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan mengaplikasikan uji F dengan skala toleransi dalam penelitian ini 10% atau 0,1. Pengujian dapat diterapkan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Apabila nilai  $F_{hitung}$  lebih rendah dari 0,1 maka bisa ditarik kesimpulannya bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Rumus uji F adalah sebagai berikut:

$$Fh = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2) / (n - K - 1)}$$

Rincian:

$Fh$  = Nilai  $F_{hitung}$

$R^2$  = Koefisien Determinasi

$n$  = Jumlah Sampel

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Hasil survei akan dibahas pada sub bab ini. Data dikumpulkan terlebih dahulu dengan Microsoft Excel, lalu diolah dengan SPSS 25.

##### 4.1.1. Data Responden

Angket disalurkan lewat tautan G-form di platform sosial. Data yang digunakan yaitu 100 individu yang memiliki kendaraan bermotor di Banyuwangi dan pernah menunggak pajak pada tahun 2019-2023.

##### a. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

*Output* rekapitulasi subyek berlandaskan jenis kelamin ditampilkan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	47	47%
Perempuan	53	53%
Jumlah	100	100%

*Sumber: lampiran 2*

Menurut tabel karakteristik jenis kelamin yang telah disajikan, maka nominal responden paling banyak 53 orang yang berjenis kelamin perempuan. Maka dapat disimpulkan mayoritas partisipan seorang perempuan.

**b. Data Responden Berdasarkan Tahun Menunggak Pajak**

Hasil perhitungan responden berdasarkan tahun menunggak pajak disajikan pada tabel 4.2.

**Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Tahun Menunggak Pajak**

Tahun Menunggak Pajak	Frekuensi	Persentase
2019	10	10%
2020	34	34%
2021	15	15%
2022	21	21%
2023	20	20%
Jumlah	100	100%

*Sumber: Lampiran 2*

Berlandaskan tabel diatas, dapat diketahui responden yang menunggak pajak pada tahun 2019 sebanyak 10 responden, tahun 2020 sebanyak 34 responden, tahun 2021 sebanyak 15 responden, tahun 2022 sebanyak 21 responden, dan tahun 2023 sebanyak 20 responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden yang menunggak pajak terbanyak berada pada tahun 2020 sebanyak 34 responden.

**c. Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Hasil laporan subjek menurut pendidikan terakhir disajikan pada tabel 4.3.

**Tabel 4. 3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SD/MI	16	16%
SMP/SLTP	11	11%
SMA/SLTA	63	63%
S1/S2	10	10%
Jumlah	100	100%

*Sumber: Lampiran 2*

Berlandaskan tabel diatas, dapat diketahui bahwa partisipan dengan pendidikan akhir SD/MI sebesar 16 orang, SMP/SLTP sebesar 11 orang, SMA/SLTA sebesar 63 orang, dan S1/S2 sebesar 10 orang. kesimpulannya bahwa data jumlah partisipan terbanyak yaitu dengan pendidikan terakhir SMA/SLTA dengan total 63 orang.

#### **d. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Hasil laporan partisipan menurut pekerjaan disajikan pada tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4. 4 Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
ASN	3	3%
Karyawan Swasta	24	24%
Wiraswasta	24	24%
Pelajar/Mahasiswa	21	21%
Lainnya	28	28%
Jumlah	100	100%

*Sumber: Lampiran 2*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diringkas bahwa responden dengan pekerjaan ASN sebanyak 3 orang, Karyawan Swasta Sebanyak 24 orang, Wiraswasta sebanyak 24 orang, Pelajar/Mahasiswa sebanyak 21 orang dan dengan pekerjaan lainnya sebanyak 28 orang.

**e. Data Responden Berdasarkan Usia**

. Hasil rekapitulasi responden berdasarkan usia disajikan pada tabel 4.5.

**Tabel 4. 5 Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Frekuensi	Persentase
18-30 Tahun	58	58%
31-40 Tahun	8	8%
41-55 Tahun	31	31%
56-76 Tahun	3	3%
Jumlah	100	100%

*Sumber: Lampiran 2*

Berdasarkan tabel karakteristik di atas, terlihat bahwa jumlah partisipan berusia 18-30 tahun mencapai 58 orang, partisipan berusia 31-40 tahun sebanyak 8 orang, partisipan berusia 41-55 tahun sebanyak 31 orang, dan responden berusia 56-76 tahun sebanyak 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang pernah menunggak pajak kendaraan bermotor di Banyuwangi didominasi oleh kelompok usia 18-30 tahun.

#### f. Data Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan

Hasil perhitungan berdasarkan pendapatan setiap bulan dibedakan menjadi  $\leq$ Rp. 1.500.000, Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000, Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000 dan  $\geq$ Rp. 3.500.000.

**Tabel 4. 6 Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan**

Pendapatan Per Bulan	Frekuensi	Persentase
$\leq$ Rp. 1.500.000	64	64%
Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000	22	22%
Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000	10	10%
$\geq$ Rp. 3.500.000	4	4%

*Sumber: Lampiran 2*

Dari tabel karakteristik diatas dapat dilihat bahwa reponden dengan pendapatan per bulan  $\leq$  Rp. 1.500.000 sebanyak 64 reponden, Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000 sebanyak 22 responden, Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000 sebanyak 10 responden dan  $\geq$ Rp. 3.500.000 berjumlah 4 responden.

#### g. Data Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan

Data partisipan menurut jenis kendaraan dibedakan menjadi 2 yaitu jenis kendaraan roda dua dan roda empat. Berikut merupakan hasil rekapitulasinya.

**Tabel 4. 7 Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan**

Jenis Kendaraan	Frekuensi	Persentase
Roda Dua	95	95%
Roda Empat	5	5%
Jumlah	100	100%

*Sumber: Lampiran 2*

Berdasarkan tabel karakteristik tersebut, jumlah responden terbanyak adalah responden dengan jenis kendaraan roda dua dengan jumlah 95 responden sedangkan responden dengan jenis kendaraan roda empat hanya 5 reponden.

#### 4.1.2 Deskripsi Variabel

##### a. Sanksi Pajak

evaluasi yang dilakukan oleh responden terhadap setiap pernyataan yang berhubungan dengan sanksi pajak (X1). Tabel 4.8 berikut menunjukkan informasi ini.

**Tabel 4. 8 Deskripsi Variabel Sanksi Pajak**

No	Pernyataan	Frekuensi					Total	Modus
		SS	S	RG	TS	STS		
1.	Menurut saya, hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak sudah jelas (X1.1).	25	60	10	3	2	100	S
2.	Menurut saya, wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor diberi sanksi yang tegas (X1.2).	18	63	11	8	0	100	S
3.	Menurut saya, sanksi pajak kendaraan bermotor yang diberikan sesuai	27	51	14	7	1	100	S

	dengan peraturan yang berlaku (X1.3).							
4.	Menurut saya, sanksi yang diberikan akan membuat saya melunasi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (X1.4)	16	57	26	1	0	100	S

*Sumber: Lampiran 3*

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak terdiri dari 4 pernyataan. Pada pernyataan pertama, sebagian besar responden, yaitu 60 orang, menjawab setuju. Hal ini menunjukkan dominasi responden terhadap pendapat bahwa sanksi yang dikenakan kepada individu sudah jelas. Pada pernyataan kedua, sebanyak 63 responden setuju, mengindikasikan bahwa partisipan mendukung penerapan sanksi yang tegas kepada seluruh individu yang terlambat melunasi pajak kendaraan bermotor. Untuk pernyataan ketiga, 51 responden setuju, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap sanksi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. Pada pernyataan keempat, 57 responden setuju, menunjukkan bahwa mayoritas responden percaya bahwa sanksi membuat individu membayar pajak kendaraan bermotor dengan cepat.

### b. Tingkat Pendapatan

Evaluasi terhadap pernyataan terkait dengan tingkat pendapatan (X2). Ditampilkan pada tabel 4.9 berikut.

**Tabel 4. 9 Deskripsi Variabel Tingkat Pendapatan**

No	Pernyataan	Frekuensi					Total	Modus
		SS	S	RG	TS	STS		
1.	Menurut saya, sebagai individu harus taat membayar pajak kendaraan bermotor walaupun pendapatannya rendah (X2.1).	13	54	32	1	0	100	S
2.	Menurut saya, besar kecilnya pajak kendaraan bermotor yang diberikan tidak menjadi hambatan bagi saya dalam membayar pajak (X2.2).	6	50	39	5	0	100	S
3.	Saya dapat membayar jumlah pajak kendaraan yang dikenakan (X2.3).	4	79	16	1	0	100	S
4.	Saya percaya bahwa kebutuhan dasar saya, seperti makan dan belanja harian, dapat dipenuhi dengan uang yang saya	9	76	12	2	1	100	S

	peroleh. (X2.4).							
5	Menurut saya, penghasilan yang saya peroleh juga dapat melengkapi tanggungjawab saya seperti membiayai pajak kendaraan bermotor (X2.5).	9	72	18	0	1	100	S

*Sumber: Lampiran 3*

Berdasarkan Tabel 4.9, variabel tingkat pendapatan terdiri dari 5 pernyataan. Pada pernyataan pertama, sebagian besar responden, yaitu 54 orang, setuju bahwa individu harus tetap taat membayar pajak kendaraan walaupun pendapatannya rendah. Pada pernyataan kedua, 50 responden setuju bahwa besar kecilnya pajak kendaraan bermotor tidak menjadi hambatan dalam membayar pajak. Untuk pernyataan ketiga, 73 responden setuju bahwa mereka sanggup membayar jumlah pajak kendaraan bermotor yang dikenakan. Pada pernyataan keempat, 76 responden setuju bahwa pendapatan yang diperoleh dapat melengkapi kebutuhan utama seperti belanja dan makan harian. Pada pernyataan kelima, 72 responden setuju bahwa pendapatan yang diperoleh dapat melaksanakan kewajiban seperti melunasi pajak kendaraan bermotor.

### c. Pemahaman Pajak

Persepsi partisipan terhadap pernyataan terkait dengan pemahaman pajak (X3). Disajikan pada tabel 4.10 berikut.

**Tabel 4. 10 Deskripsi Variabel Pemahaman Pajak**

No	Pernyataan	Frekuensi					Total	Modus
		SS	S	RG	TS	STS		
1.	Saya telah memahami ketentuan terkait kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor (X3.1).	16	62	16	5	1	100	S
2.	Saya telah memahami hak saya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor (X3.2).	20	64	12	3	1	100	S
3.	Saya memahami denda yang akan diberikan apabila saya menunggak pajak kendaraan bermotor (X3.3).	28	63	9	0	0	100	S
4.	Saya memahami tata cara membayar pajak kendaraan bermotor (X3.4).	34	58	7	1	0	100	S
5.	Saya mengetahui bahwasanya pajak kendaraan bermotor digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah (X3.5).	9	58	33	0	0	100	S

6.	Saya mengetahui bahwasanya pajak kendaraan bermotor yang disetor dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan bagi pemerintah daerah (X3.6).	13	57	29	0	1	100	S
----	---	----	----	----	---	---	-----	---

*Sumber: Lampiran 3*

Berdasarkan Tabel 4.10, variabel pemahaman pajak terdiri dari 6 pernyataan. Jawaban responden pada pernyataan pertama menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 62 orang, setuju bahwa mereka memahami ketentuan terkait kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor. Pada pernyataan kedua, 62 responden setuju bahwa mereka memahami hak mereka sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Pada pernyataan ketiga, 63 responden setuju bahwa mereka memahami denda yang diberikan jika menunggak pajak kendaraan bermotor. Untuk pernyataan keempat, 58 responden setuju bahwa mereka memahami tata cara membayar pajak kendaraan bermotor. Pada pernyataan kelima, 58 responden setuju bahwa mereka mengetahui bahwa pajak kendaraan bermotor digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah. Terakhir, pada pernyataan keenam, 57 responden setuju bahwa mereka mengetahui bahwa pajak kendaraan bermotor yang disetor bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pemerintah daerah.

#### d. Kesadaran Wajib Pajak

Evaluasi partisipan terhadap masing-masing pernyataan terkait dengan kesadaran wajib pajak (X4). Ditampilkan pada tabel 4.11 berikut.

**Tabel 4. 11 Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

No	Pernyataan	Frekuensi					Total	Modus
		SS	S	RG	TS	STS		
1.	Menurut pendapat saya, membayar pajak kendaraan bermotor merupakan tanggung jawab yang ditanggung oleh masyarakat terhadap negara. (X4.1).	23	62	12	2	1	100	S
2.	Menurut saya, pajak kendaraan bermotor digunakan untuk pembangunan daerah (X4.2).	9	57	33	0	1	100	S
3.	Saya selalu menyisihkan uang untuk menunaikan pajak kendaraan(X4.3).	13	71	15	0	1	100	S
4.	Menurut saya, membayar pajak kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan	14	57	26	2	1	100	S

	yang berlaku dapat merugikan negara (X4.4).							
5.	Menurut saya, peraturan membayar pajak kendaraan bermotor telah ditetapkan dalam Undang-undang (X4.5).	19	63	15	2	1	100	S
6.	Saya membayar pajak kendaraan bermotor berdasarkan keputusan saya sendiri.(X4.6).	25	66	6	2	0	100	S

*Sumber: Lampiran 3*

Berdasarkan Tabel 4.11, variabel kesadaran wajib pajak terdiri dari 6 pernyataan. Pada pernyataan pertama, sebagian besar responden, yaitu 62 orang, setuju bahwa melunasi pajak kendaraan bermotor adalah tanggungjawab masyarakat terhadap negara. Pada pernyataan kedua, 57 responden setuju bahwa pajak kendaraan bermotor digunakan untuk pembangunan daerah. Pada pernyataan ketiga, 71 responden setuju bahwa mereka memiliki kesadaran dalam mengatur dana untuk pembayaran pajak. Untuk pernyataan keempat, 57 responden setuju bahwa membayar pajak kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat merugikan negara. Pada pernyataan kelima, 63 responden setuju bahwa peraturan membayar pajak kendaraan bermotor

telah ditetapkan dalam Undang-undang. Terakhir, pada pernyataan keenam, 66 responden setuju bahwa mereka membayar pajak kendaraan bermotor sesuka hatinya.

#### e. Penunggakan Pajak

Evaluasi responden terhadap masing-masing pernyataan terkait penunggakan pajak (Y). Disajikan pada tabel 4.12 berikut.

**Tabel 4. 12 Deskripsi Variabel Penunggakan Pajak**

No	Pernyataan	Frekuensi					Total	Modus
		SS	S	RG	TS	STS		
1.	Saya ingat kapan harus membayar pajak kendaraan bermotor (Y1).	26	58	16	0	0	100	S
2.	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor sebelum tanggal jatuh tempo (Y2).	6	48	46	0	0	100	RG
3.	Saya diberi denda apabila menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Y3).	25	67	8	0	0	100	S
4.	Saya membayar pajak setelah jatuh tempo (Y4).	15	58	26	1	0	100	S

*Sumber: Lampiran 3*

Berdasarkan Tabel 4.12, variabel penunggakan pajak terdiri dari 4 pernyataan. Pada pernyataan pertama, sebagian besar responden, yaitu 58 orang, setuju bahwa mereka ingat kapan harus membayar pajak kendaraan bermotor. Pada pernyataan kedua, 48 responden setuju bahwa mereka selalu membayar pajak kendaraan bermotor sebelum tanggal jatuh tempo. Untuk pernyataan ketiga, 67 responden setuju bahwa mereka akan diberi denda jika menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pada pernyataan keempat, 58 responden setuju bahwa mereka membayar pajak sebelum jatuh tempo.

## 4.2 Analisis Hasil Penelitian

### 4.2.1. Hasil Uji Instrumen

#### a. Hasil Uji Validitas

Tabel ini menggambarkan hasil perhitungan instrumen yang digunakan dalam riset ini.

**Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas Data**

Variabel	Item	$R_{\text{tabel } 0,1}$	$R_{\text{hitung}}$	Sig	Keterangan
Sanksi pajak (X1)	X1.1	0,1654	0,648	0,000	Valid
	X1.2	0,1654	0,771	0,000	Valid
	X1.3	0,1654	0,808	0,000	Valid
	X1.4	0,1654	0,661	0,000	Valid
Tingkat Pendapatan (X2)	X2.1	0,1654	0,633	0,000	Valid
	X2.2	0,1654	0,569	0,000	Valid
	X2.3	0,1654	0,608	0,000	Valid
	X2.4	0,1654	0,629	0,000	Valid
	X2.5	0,1654	0,612	0,000	Valid

Pemahaman Pajak (X3)	X3.1	0,1654	0,718	0,000	Valid
	X3.2	0,1654	0,787	0,000	Valid
	X3.3	0,1654	0,734	0,000	Valid
	X3.4	0,1654	0,545	0,000	Valid
	X3.5	0,1654	0,583	0,000	Valid
	X3.6	0,1654	0,575	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	X4.1	0,1654	0,762	0,000	Valid
	X4.2	0,1654	0,693	0,000	Valid
	X4.3	0,1654	0,701	0,000	Valid
	X4.4	0,1654	0,706	0,000	Valid
	X4.5	0,1654	0,785	0,000	Valid
	X4.6	0,1654	0,684	0,000	Valid
Penunggakan Pajak (Y)	Y1.1	0,1654	0,737	0,000	Valid
	Y1.2	0,1654	0,731	0,000	Valid
	Y1.3	0,1654	0,726	0,000	Valid
	Y1.4	0,1654	0,734	0,000	Valid

*Sumber: Lampiran 4*

Dari Tabel 4.13 terlihat bahwa semua korelasi antara indikator dengan masing-masing variabel sanksi pajak, tingkat pendapatan, pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan penunggakan pajak mengindikasikan nilai  $r$  hitung sebesar 0,1654, yang lebih tinggi dari nilai  $r$  tabel yang telah ditetapkan dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,1. Hasil ini menyatakan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner, berdasarkan indikator-indikator variabel yang diterapkan dalam riset ini, dapat dianggap valid dan dapat dipertimbangkan untuk diterapkan sebagai instrumen dalam pengumpulan data riset.

#### **b. Hasil Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas berfungsi untuk mengevaluasi seberapa konsisten atau dapat diandalkan sebuah daftar pernyataan sebagai

indikator dari variabel tertentu, dengan memastikan bahwa respons terhadap pernyataan tetap stabil dari waktu ke waktu. Berikut adalah hasil uji reliabilitas data dalam riset ini.

**Tabel 4. 14 Hasil Uji Reliabilitas Data**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,695	Reliabel
X2	0,609	Reliabel
X3	0,767	Reliabel
X4	0,815	Reliabel
Y	0,709	Reliabel

*Sumber: Lampiran 5*

Dari Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa hasil analisis uji reliabilitas pada variabel sanksi pajak (X1), tingkat pendapatan (X2), pemahaman pajak (X3), kesadaran wajib pajak (X4), dan penunggakan pajak (Y) mengindikasikan bahwa nilai *Cronbach's alpha* melebihi nilai signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,60. Hal ini mengindikasikan bahwa semua pernyataan angket menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi, sehingga kuesioner tersebut dapat dianggap sebagai alat yang dapat dipercaya.

#### 4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 1. Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji *Komogrov-Smirnov* digunakan untuk menilai apakah distribusi data bersifat normal atau tidak.

**Tabel 4. 15 Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,48920703
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,081
	Positive	,056
	Negative	-,081
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,107 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

*Sumber: Lampiran 6*

Berdasarkan Tabel 4.15, hasil uji normalitas data menerapkan *Kolmogorov-Smirnov* mengindikasikan hasil uji asimptotik sebesar 0,107, yang lebih besar dari signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,1. Ini menunjukkan bahwa data yang didapatkan dari jawaban partisipan dalam kuesioner pada riset ini dapat dianggap berdistribusi secara normal..

## **2. Hasil Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas berfungsi untuk menilai apakah ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami masalah korelasi yang signifikan antara variabel independennya.

**Tabel 4. 16 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sanksi Pajak	,797	1,254
	Tingkat Pendapatan	,842	1,188
	Pemahaman pajak	,646	1,547
	Kesadaran Wajib Pajak	,815	1,227

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 7

Dari tabel 4.16 hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai  $VIF < 10$  dan  $tolerance > 0,10$ . Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinearitas di antara variabel-variabel yang diterapkan pada riset ini, maka dari itu model regresi dapat dianggap cocok untuk digunakan.

### 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah terdapat ketidakseragaman dalam variansi residual antar pengamatan dalam model regresi. Dalam riset ini, Uji Glejser berfungsi untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 4. 17 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,556	1,145		,486	,628
	TX1	,024	,045	,060	,524	,601
	TX2	,037	,052	,079	,711	,479
	TX3	,014	,042	,041	,328	,744
	TX4	-,033	,034	-,108	-,960	,339

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Lampiran 8

Dari gambar 4.17 hasil dari pengujian terlihat bahwa nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terindikasi heteroskedastisitas.

#### 4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda berfungsi agar mengevaluasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini tersaji pada Tabel 4.18 sebagai berikut:

**Tabel 4. 18 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	5,341	1,910		2,796	,006
	Sanksi Pajak	,239	,075	,303	3,192	,002
	Tingkat Pendapatan	-,025	,087	-,027	-,290	,773
	Pemahaman Pajak	,171	,070	,256	2,427	,017
	Kesadaran Wajib Pajak	,128	,057	,211	2,245	,027

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 9

Hasil regresi linier berganda menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,341 + 0,239X_1 - 0,025X_2 + 0,171X_3 + 0,128X_4$$

Dari persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Konstanta (a) positif menjelaskan bahwa variabel independen sanksi pajak (X1), tingkat pendapatan (X2), pemahaman pajak (X3) dan kesadaran wajib pajak (X4) konstan maka, besar nilai penunggakan pajak 5,341.
- b. variabel sanksi pajak (X1) atas penunggakan pajak (Y) koefisien regresinya positif sebesar 0,239 yang berarti bahwa jika semakin

- besar denda pajak kendaraan bermotor maka penunggakan pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan juga.
- c. variabel tingkat pendapatan (X2) terhadap penunggakan pajak (Y) koefisien regresinya negatif sebesar 0,025 yang berarti bahwa apabila tingkat pendapatan mengalami penurunan maka penunggakan pajak akan mengalami kenaikan.
- d. variabel pemahaman pajak (X3) terhadap penunggakan pajak (Y) koefisien regresinya positif sebesar 0,171 yang berarti bahwa jika pemahaman peraturan pajak kendaraan bermotor meningkat maka penunggakan pajak kendaraan bermotor akan naik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jawaban responden setuju terkait kuisisioner pemahaman pajak, namun pada pernyataan penunggakan pajak banyak jawaban responden yang setuju bahwa responden tersebut membayar pajak setelah tanggal jatuh tempo. Wajib pajak dengan pemahaman pajak lebih baik dapat mengetahui kerumitan dan celah hukum untuk menunda pembayaran, serta melakukan penghitungan resiko dan manfaat menunggak pajak demi keuntungan finansial jangka pendek. Hal ini karena adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
- e. variabel kesadaran wajib pajak (X4) terhadap penunggakan pajak (Y) koefisien regresinya positif sebesar 0,128 hal ini berarti bahwa apabila kesadaran wajib pajak meningkat maka penunggakan

pajak akan naik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jawaban responden setuju terkait kuisisioner kesadaran wajib pajak, namun pada pernyataan penunggakan pajak banyak jawaban responden yang setuju bahwa responden tersebut membayar pajak setelah tanggal jatuh tempo. Kesadaran yang lebih tinggi membuat wajib pajak lebih cermat dalam menghitung resiko dan manfaat menunggak pajak.

#### 4.2.4 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berikut merupakan hasil dari analisis regresi yang mengindikasikan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

**Tabel 4. 19 Hasil Koefisien Determinasi**

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,563 a	,317	,288	1,52024

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Pemahaman pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 10

Berdasarkan tabel hasil nilai determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,288 atau 28%. Riset ini mengindikasikan elemen sanksi pajak, tingkat pendapatan, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib

pajak yang diangkat dalam riset ini memiliki koefisien 28,8% yang berarti kontribusi pengaruh variabel independet terhadap variabel dependen sebesar 0,288 atau 28,8% sedangkan 71,2% lainnya terdapat pada variabel lain yang tidak di teliti.

#### 4.2.5 Uji Hipotesis

##### 1. Hasil Uji Parsial

Uji t berfungsi agar mengukur seberapa besar dampak variabel independen pada penjelasan variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikansinya kurang dari 0,1.

**Tabel 4. 20 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B		Beta		
1 (Constant)	5,341	1,910		2,796	,006
Sanksi Pajak	,239	,075	,303	3,192	,002
Tingkat Pendapatan	-,025	,087	-,027	-,290	,773
Pemahaman Pajak	,171	,070	,256	2,427	,017
Kesadaran Wajib Pajak	,128	,057	,211	2,245	,027

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 9

Dari data diatas dijelaskan sebagai berikut:

Hasil t hitung berlandaskan rumus  $t_{tabel} = \alpha ; n - k - 1$

Rincian:

$\alpha$ : Nilai probabilitas

k: jumlah variabel

Jadi t tabel = 0,1 ; 100 – 4 – 1 = 0,1 ; 95 = 1,66105

Dampak parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan dibawah ini:

a. Sanksi Pajak Terhadap Penunggakan Pajak

Nilai t hitung 3,192 dan nilai signifikansi t (sig-t) 0,002.

Artinya nilai t hitung lebih tinggi dari t tabel atau  $3,192 > 1,66105$  sedangkan nilai signifikansi tersebut lebih rendah dari 0,01 atau  $0,002 < 0,1$ . Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel sanksi pajak berdampak secara parsial terhadap variabel penunggakan pajak.

b. Tingkat Pendapatan Terhadap Penunggakan Pajak

Nilai t hitung -0,290 dan nilai signifikansi t (sig-t) 0,773.

Artinya nilai t hitung lebih tinggi dari nilai t tabel atau  $-0,290 < 1,66105$  sedangkan nilai signifikansi tersebut lebih tinggi dari 0,01 atau  $0,773 > 0,1$ . Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berdampak terhadap variabel penunggakan pajak.

c. Pemahaman Pajak Terhadap Penunggakan Pajak

t hitung 2,427 dan nilai signifikansi t (sig-t) 0,017. Artinya nilai t hitung lebih tinggi dari t tabel atau  $2,427 > 1,66105$  sedangkan angka signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,1 atau  $0,017 < 0,1$ . Sehingga disimpulkan bahwa variabel pemahaman pajak berdampak secara parsial terhadap variabel penunggakan pajak.

d. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penunggakan Pajak

Nilai t hitung 2,245 dan nilai signifikansi t (sig-t) 0,027. Artinya nilai t hitung lebih tinggi dari t tabel atau  $2,245 > 1,66105$  sedangkan nilai signifikansi tersebut lebih rendah dari 0,1 atau  $0,027 < 0,1$ . Sehingga disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berdampak secara parsial terhadap variabel penunggakan pajak.

## 2. Hasil Uji Simultan

Berikut adalah tabel yang menampilkan hasil dari uji simultan untuk menguji pengaruh variabel-variabel secara bersama-sama..

**Tabel 4. 21 Hasil Uji Simultan**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	101,684	4	25,421	10,999	,000 <sup>b</sup>
	Residual	219,556	95	2,311		
	Total	321,240	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), TX4, TX1, TX2, TX3

Sumber: Lampiran 9

Berdasarkan Tabel 4.21 di atas, nilai F hitung sebesar 10,999 menunjukkan bahwa nilai F hitung melebihi nilai F tabel, yaitu 2,01, yang dihitung dari  $F = (K: n-k)$ , dengan  $K = 0,1$  dan  $n-k = 100 - 4$ . Ini mengindikasikan bahwa  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ . Selain itu, nilai signifikansi yang tercantum di tabel adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,1. Berdasarkan kedua kriteria ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak, tingkat pendapatan, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penunggakan pajak.

### 4.3 Interpretasi Hasil Penelitian

#### 1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penunggakan Pajak.

Bersumber pada hasil hipotesis pertama dalam riset ini, menyatakan bahwa denda pajak berdampak signifikan terhadap penunggakan pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah denda pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan, semakin tinggi juga tingkat penunggakan pajak.

Sanksi pajak adalah alat *preventif* supaya individu tidak melanggar norma perpajakan yang ada Mardiasmo, (2016). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi penting guna memberikan pelajaran bagi individu kendaraan bermotor yang telah menunggak pajak.. Pada ini riset yang dilakukan pada individu yang mempunyai kendaraan bermotor di

Kabupaten Banyuwangi variabel sanksi pajak berdampak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil data pernyataan responden di peroleh nilai t hitung lebih rendah dari t tabel. Dengan diterapkannya sanksi pajak kendaraan bermotor yang adil dan tegas terhadap wajib pajak yang melanggar, mulai dari yang ringan hingga yang berat dapat mengurangi penunggakan pajak kendaraan bermotor

Hasil riset mengindikasikan bahwa variabel sanksi pajak berdampak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Riset ini didukung oleh Algon Neo Situmeang dan Poniman (2023) dan Wardati & Pattisahusiwa (2022) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berdampak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Bersumber dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tegas dan adil dalam menerapkan sanksi pajak kendaraan bermotor maka dapat mengurangi penunggakan pajak kendaraan bermotor.

## **2. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Penunggakan Pajak**

Hasil hipotesis kedua dalam riset ini yaitu tingkat pendapatan tidak berdampak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu dapat di ambil ringkasan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendapatan maka akan semakin meningkatkan penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Sari & Susanti (2015) seperti yang dikutip dalam Alfiani & Subadriyah (2018), tingkat pendapatan merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajak, yang terkait erat dengan besarnya penghasilan yang diperoleh, untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan.. Penghasilan individu berbeda-beda tergantung pada bisnis atau pekerjaan yang mereka lakukan. Individu dengan penghasilan rendah maupun tinggi tidak patuh dalam membayar pajaknya karena kurangnya kesadaran dalam individu dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Pada penelitian ini yang dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi variabel tingkat pendapatan tidak berdampak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil data pernyataan responden diperoleh nilai  $t$  hitung lebih tinggi dari  $t$  tabel, yang berarti meskipun wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi maupun rendah tidak menjamin individu tersebut melunasi pajak kendaraan bermotornya.

Riset ini berbanding lurus dengan riset Oktavia et al., (2019). Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel pendapatan tidak signifikansi mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin rendah maupun tinggi tingkat pendapatan tidak akan mempengaruhi penunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut

disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan bermotornya.

### **3. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Penunggakan Pajak.**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pemahaman mengenai pajak berdampak krusial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga dalam riset ini dapat diterima.

Pemahaman pajak merujuk pada proses di mana individu memahami dan mengetahui peraturan, undang-undang, serta prosedur perpajakan, dan mengaplikasikannya dalam aktivitas perpajakan (Alfiani & Subadriyah, 2018). Dalam riset ini yang dilakukan pada individu yang memiliki kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi jawaban responden dominan setuju terkait kuisioner pemahaman pajak, namun pada pernyataan penunggakan pajak banyak jawaban responden yang setuju bahwa responden tersebut membayar pajak setelah tanggal jatuh tempo, yang berarti bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak lebih baik dapat melakukan penghitungan resiko dan manfaat menunggak pajak demi keuntungan finansial jangka pendek. Hal ini disebabkan karena adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini sejalan dengan studi oleh Siska Alfiani Subadriah (2018), Wardati & Pattisahusiwa (2022), meunjukkan bahwa pemahaman pajak berdampak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa individu yang mempunyai pemahaman peraturan perpajakan dapat melakukan penghitungan resiko ketika menunggak pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

#### **4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.**

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berdampak signifikan pada penunggakan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa hipotesis ke empat dalam riset ini dapat diterima.

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana individu mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada kas negara Rukmana, (2013) dalam Alfiani & Subadriyah, (2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan banyak jawaban responden setuju terkait kuisioner kesadaran wajib pajak, namun pada pernyataan penunggakan pajak banyak jawaban responden yang setuju bahwa responden tersebut membayar pajak setelah tanggal jatuh tempo. Kesadaran yang lebih tinggi membuat wajib pajak lebih cermat dalam menghitung resiko dan manfaat menunggak pajak serta kesadaran wajib pajak yang tinggi tanpa adanya sikap disiplin dalam pembayaran pajak dapat menyebabkan penundaan yang berujung pada penunggakan. Terutama dengan adanya *Self assesment system* yang diterapkan di

Indonesia dalam pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab dan kebebasan bagi individu dalam melakukan tanggungan perpajakannya.

Hasil riset ini sejalan dengan riset oleh Algon Neo Situmeang dan Poniman (2023) dan Siska Alfiani dan Subadriah (2018). Hasil penelitian yang menyampaikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berdampak terhadap variabel penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil keputusan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi jika tidak ada sikap disiplin dalam pembayaran pajak dapat menyebabkan penundaan yang berujung pada penunggakan pajak kendaraan bermotor.

#### **5. Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.**

Hasil hipotesis kelima pada riset ini adalah sanksi pajak, tingkat pendapatan, pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berdampak secara simultan pada penunggakan pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu dapat diambil keputusan bahwa hipotesis kelima di terima. Dari riset ini dapat di simpulkan bahwa seluruh variabel independen mempunyai pengaruh terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Hasil studi ini berbanding lurus dengan studi yang dilakukan oleh Algon Neo Situmeang dan Poniman (2023), mengindikasikan bahwa

kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak berdampak secara simultan pada penunggakan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel tingkat pendapatan didukung oleh Alfiani dan Subadriyah (2018), yang menyatakan bahwa kesadaran pendapatan, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan, kelalaian, pendidikan dan pemahaman pajak berpengaruh secara simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini berasal dari interpretasi analisis data yang terkait dengan masalah penelitian yang telah diformulasikan. Dari beberapa pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tegas dan adil dalam menerapkan sanksi pajak kendaraan bermotor maka dapat mengurangi penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi.
2. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang rendah maupun tinggi tidak akan mempengaruhi penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi.
3. Pemahaman pajak berpengaruh secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meningkatnya pengetahuan dan pemahaman

terhadap peraturan perpajakan kendaraan bermotor maka akan mempengaruhi penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki pemahaman peraturan perpajakan dapat melakukan penghitungan resiko ketika menunggak pajak kendaraan bermotornya.

4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Kesadaran masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang tinggi mengenai kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa adanya sikap disiplin dapat menyebabkan penundaan yang berujung pada penunggakan.
5. Sanksi pajak, tingkat pendapatan, pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini mengartikan bahwa secara bersama-sama variabel sanksi pajak, tingkat pendapatan, pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi.

## **5.2 Implikasi**

Implikasi merupakan suatu dampak temuan yang dihasilkan dari suatu hasil penelitian. Setelah dilakukannya penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak, tingkat pendapatan, pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi, maka implikasi dari riset ini adalah sebagai berikut:

Dalam riset ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berdampak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi. Dengan diberlakukannya sanksi pajak yang tegas dan rutin melakukan razia kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi akan memberikan efek jera sehingga membuat masyarakat di Kabupaten Banyuwangi tidak melakukan penunggakan pajak. Pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi, maka Polres Banyuwangi perlu memberikan sosialisasi terkait pajak kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat di Kabupaten Banyuwangi memahami peraturan perpajakan kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Banyuwangi untuk membayar kewajibannya sebagai warga negara. Bagi Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Banyuwangi diharapkan lebih aktif lagi dalam mengingatkan batas akhir pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil riset dan batasan peneliti ini, penulis menyampaikan rekomendasi untuk penelitian mendatang sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya dianjurkan untuk mempertimbangkan penambahan variabel seperti kualitas pelayanan dan tingkat pendidikan guna memperluas cakupan hasil penelitian terhadap perpajakan

2. Wajib pajak yang belum me;unasi pajak kendaraan bermotor tepat waktu diharapkan supaya lebih meningkatkan kesadaran dan kemauan mereka dalam membayar pajak. Ini karena pembayaran pajak kendaraan bermotor telah disederhanakan melalui layanan SAMSAT Drive Thru, SAMSAT Keliling, serta E-samsat dan Samsat Online yang memungkinkan pembayaran secara daring..

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Agnez, Y. (2023). *Bukan Jakarta, Jawa Timur Adalah Provinsi dengan Kendaraan Bermotor Terbanyak*. REPUBLIKA. <https://data.goodstats.id/statistic/agneszefanyayonatan/bukan-jakarta-jawa-timur-adalah-provinsi-dengan-kendaraan-bermotor-terbanyak-RY9MI>
- Alfiani, S., & Subadriyah. (2018). Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2(1), 18–35. <http://ejournal.unisnu.ac.id/jra/>
- Amri, H., Syahfitri, D. I., & Sumbawa, U. T. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa*. 2(2), 108–118.
- Barlan, A. R., Mursalim Laekking, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan , Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua ( Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi ). *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74–88.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, A. (2023, May 1). Target PAD di Jatim terealisasi 50 persen lebih. *Antara Kantor Berita Indonesia*, 1. <https://www.antaraneews.com/berita/3634335/target-pad-di-jatim-terrealisasi-50-persen-lebih>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi

Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. [chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf)

Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN (XVIII)*. Penerbit Andi.

Meutiaa, T., Rayb, S. A., & Rizalc, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216–229. <https://ejurnalunsam.id/>

Oktavia, E., Safri, M., & Vyn Amzar, Y. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tanjung Jabung Barat (studi kasus: Kecamatan Tungkal Ilir). *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 7(2), 73–82. <https://doi.org/10.22437/pim.v7i2.13098>

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.  
Ramadan Anggia, Radlyan Rahim, N. N. U. (2023). *Teori Pendapatan*. PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP.

Sihombing, S., & Alestriaana, S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8).

Situmeang, A. N. (2023). *SEIKO : Journal of Management & Business Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak*. 6(1), 217–225.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (II)*. Penerbit Alfabeta.

Tangoy, J. A., Engka, D. S. M., Masloman, I., Pembangunan, S. E., Ekonomi, F., & Ratulangi, S. (2023). *Tangoydocx*. 23, 1–12.

Wardati, A. R., & Pattisahusiwa, S. (2022). *Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kutai Kartanegara ( Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor )*. 7(3).

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). *360095-Pengaruh-Program-Pemutihan-Pajak-Kendara-97520266*. 3(2), 129–143.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

#### PENGARUH SANKSI PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN, PEMAHAMAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa strata satu (S1) Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala.

Nama : Eva Oktaviana Wulandari

Nim : 20104839

Saya mohon bapak/ibu/saudara (i) untuk meluangkan waktunya dalam membantu saya menyelesaikan kuisisioner riset ini.

#### A. Petunjuk Pengisian :

1. Daftar pernyataan di bawah ini hanya terbatas pada data penelitian yang termasuk dalam penyelesaian studi.
2. Berikan tanda (√) pernyataan yang bapak/ibu/saudara (i) setuju.
3. Jawaban terdiri dari sangat setuju (SS), setuju (ST), ragu-ragu (RR), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).
4. Responden riset ini hanya wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi yang pernah menunggak pajak.

#### B. Identitas Partisipan

1. No Partisipan : (di isi peneliti)
2. Nama :

3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Pernah menunggak pajak : Ya Tidak
5. Tahun menunggak pajak : 2019 2020  
2021 2022  
2023
6. Alamat :
7. Usia :
8. Pendidikan terakhir : SD/MI SMP/SLTP  
SMA/SLTA S1/S2
9. Pekerjaan : ASN Karyawan Swasta  
Wiraswasta Pelajar/Mahasiswa  
Lainnya
10. Pendapatan per bulan :  $\leq$  Rp. 1.500.000  
Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000  
Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000  
 $\geq$  Rp. 3.500.000
11. Jenis kendaraan : Roda Dua Roda Empat
12. Lama kepemilikan : 1-5 Tahun 6-10 Tahun  
11-15 Tahun
13. Jumlah kendaraan :

Sanksi Pajak						
No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	ST	RG	TS	STS
1	Menurut saya, sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak saat terlambat membayar pajak sudah jelas.					
2	Menurut pendapat saya, sanksi diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.					
3	Saya percaya, sanksi pajak kendaraan bermotor yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
4	Sanksi yang diberikan, menurut pendapat saya, akan membuat saya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.					

Tingkat Pendapatan						
No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	ST	RG	TS	STS
1	Menurut saya, sebagai wajib pajak harus tetap taat membayar pajak kendaraan bermotor meskipun pendapatannya rendah.					
2	Menurut saya, besar kecilnya pajak kendaraan bermotor yang diberikan tidak menjadi hambatan bagi saya dalam membayar pajak.					

3	Saya sanggup untuk membayar jumlah pajak kendaraan bermotor yang dikenakan.					
4	Saya percaya bahwa kebutuhan dasar saya, seperti makan dan belanja sehari-hari, dapat dipenuhi dengan uang yang saya peroleh.					
5	Saya percaya bahwa pendapatan yang saya dapat memenuhi kewajiban saya, seperti membayar pajak kendaraan bermotor.					

Pemahaman Pajak						
No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	ST	RG	TS	STS
1	Saya telah memahami ketentuan terkait kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor.					
2	Saya telah memahami hak saya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.					
3	Saya memahami denda yang akan diberikan apabila saya menunggak pajak kendaraan bermotor.					
4	Saya memahami prosedur membayar pajak kendaraan bermotor.					
5	Saya mengetahui bahwasanya pajak kendaraan bermotor digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah.					
6	Saya mengetahui bahwasanya pajak kendaraan bermotor yang disetor dapat					

	digunakan untuk memberikan dana kepada pemerintah daerah					
--	--	--	--	--	--	--

Kesadaran Wajib Pajak						
No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	ST	RG	TS	STS
1	Menurut saya, salah satu tanggungjawab masyarakat terhadap negara adalah melunasi pajak kendaraan bermotor.					
2	Menurut saya, pembangunan wilayah dibantu oleh pajak kendaraan bermotor.					
3	Saya konsisten mengalokasikan atau menyetor uang untuk melunasi pajak kendaraan bermotor.					
4	Menurut saya, menunaikan pajak kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat merugikan negara.					
5	Menurut saya, peraturan membayar pajak kendaraan bermotor sudah ditetapkan pada Undang-undang					
6	Saya dengan sukarela melunasi pajak kendaraan bermotor.					

Penunggakan Pajak						
No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	ST	RG	TS	STS
1	Saya ingat kapan harus menunaikan pajak kendaraan bermotor.					
2	Saya selalu menunaikan pajak kendaraan bermotor sebelum tenggat waktu					
3	Saya diberi denda tatkala menunggak dalam melunasi pajak kendaraan bermotor.					
4	Saya membayar pajak setelah jatuh tempo.					

## Lampiran 2 Data Responden

Nama	Tahun Menunggak Pajak	Jenis Kelamin	Usia	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan	Pendapatan Perbulan	Jenis Kendaraan
Partisipan 1	2021	L	20	Karang Harjo, DS. Temuasri KEC. SEMPUR Banyuwangi	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000	Roda Dua
Partisipan2	2022	L	54	Tegaldimo	SMA/SLTA	Lainnya	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan3	2020	P	22	Dusun Jatipasir Kalibaru	SMA/SLTA	Lainnya	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan4	2022	P	30	Muncar	S1/S2	Lainnya	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan5	2022	P	22	Jl. Kadir Kalibaru, Banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Ma hasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan6	2020	P	22	Kalibaru- Banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Ma hasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan7	2022	P	21	Dsn krajan glenmore banyuwangi	SMA/SLTA	Lainnya	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua

Partisipan8	2021	P	20	genteng, banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Ma hasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan9	2020	P	22	Sempu	SMA/SLTA	Pelajar/Ma hasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan10	2021	P	21	Ds kaligondo, kec. Genteng, kab banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Ma hasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 11	2022	P	22	Kalibaru kulon	SMA/SLTA	Wiraswasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 12	2019	L	21	Dsn Tegal pakis desa kalibaru wetan	SMA/SLTA	Pelajar/Ma hasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 13	2019	L	22	kajarharjo kalibaru banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Ma hasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 14	2022	P	22	barurejo banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Ma hasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 15	2020	P	21	Desa Kalibarumanis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur	S1/S2	Pelajar/Ma hasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 16	2021	P	24	Banyuwangi	S1/S2	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua

Partisipan17	2019	L	20	Dsn sidodadi rt 01 rw 04	SMA/SLTA	Wiraswasta	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan18	2021	P	21	Dsn. Sumberluhur, Desa. Tegaldlimo, Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Ma hasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan19	2020	L	2	Kalibaru, banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Ma hasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan20	2020	P	25	Banyuwangi	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 21	2022	P	23	Kaliabaru wetan	S1/S2	Karyawan Swasta	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan 22	2022	P	22	kalibaru banyuwangi	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000	Roda Dua
Partisipan 23	2022	P	23	Simbar Karangsari kecamatan Sempu Banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Ma hasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 24	2022	P	27	Dsn. Terongan RT 02 RW 07 Ds. Kebonrejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi	S1/S2	Karyawan Swasta	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000	Roda Dua

Partisipan 25	2020	P	22	Sumbersari Srono Banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Mahasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 26	2023	L	23	Kecamatan muncar kabupaten Banyuwangi	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000	Roda Dua
Partisipan 27	2022	L	26	Glagah	SMP/SLTP	Lainnya	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000	Roda Dua
Partisipan 28	2022	L	22	Jln Argopuro lingk kalatak kalipuro	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000	Roda Dua
Partisipan 29	2023	P	22	Dusun secawan	SMA/SLTA	Pelajar/Mahasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 30	2019	P	32	Jln kadir rt/rw 01/07 krajan kalibaru wetan , kecmtan kalibaru Banyuwangi	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 31	2020	L	25	Kalibaru	SMA/SLTA	Lainnya	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan 32	2021	P	21	Banyuwangi	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 33	2019	P	22	Banyuwangi	SMA/SLTA	Lainnya	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000	Roda Dua
Partisipan 34	2022	P	23	banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Mahasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua

Partisipan 35	2022	P	22	Banyuwangi	S1/S2	Pelajar/Mahasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 36	2020	P	22	Dsn. Terongan RT 001/ RW 001, Ds. Kebonrejo, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 37	2023	P	19	kalibaru wetan, utara ban, banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Mahasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 38	2021	P	22	Karangsari kec.Sempu Banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Mahasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 39	2020	P	21	Banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Mahasiswa	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 40	2020	P	22	kecamatan giri	SMA/SLTA	Pelajar/Mahasiswa	>Rp. 3.500.000	Roda Empat
Partisipan 41	2023	P	27	Srono	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan 42	2020	L	29	kalipuro	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000	Roda Dua

Partisipan 43	2019	L	34	Genteng wetan	SMA/SLTA	Lainnya	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan 44	2019	P	55	KEBONREJO	SD/MI	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 45	2019	P	47	KEBONREJO	SD/MI	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 46	2023	L	49	Giri	SD/MI	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 47	2020	P	53	KEBONREJO	SD/MI	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 48	2020	P	22	Giri	S1/S2	Karyawan Swasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 49	2020	P	27	kajarharjo kalibaru banyuwangi	S1/S2	Karyawan Swasta	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan 50	2020	L	37	kalibaru wetan	SMP/SLTP	Wiraswasta	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan 51	2020	L	48	jl kadir	SMP/SLTP	Wiraswasta	<Rp. 1.500.000	Roda Empat
Partisipan 52	2021	L	43	jl kadir	SMA/SLTA	Wiraswasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 53	2021	P	55	KEBONREJO	SD/MI	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Empat
Partisipan 54	2020	L	51	utarban	SD/MI	Wiraswasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 55	2020	P	51	kebonrejo	SD/MI	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 56	2020	L	69	terongan	SD/MI	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 57	2020	L	51	kalibaruwetan	SMA/SLTA	Wiraswasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 58	2021	L	62	utarban	SMP/SLTP	Wiraswasta	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua

Partisipan 59	2020	L	54	kalibaruwat	SMA/SLTA	Wiraswasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 60	2022	L	57	utaraban	SMA/SLTA	Wiraswasta	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan 61	2021	L	52	kalibaruwetan	SMA/SLTA	Wiraswasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 62	2020	L	45	kalibaru	SMA/SLTA	Wiraswasta	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan 63	2020	L	48	kalibaruweta	SMA/SLTA	Wiraswasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 64	2020	L	54	kalibaru	SMA/SLTA	Wiraswasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 65	2021	L	52	KEBONREJO	SD/MI	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 66	2022	P	20	KEBONREJO	SMP/SLTP	Wiraswasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 67	2023	P	42	KEBONREJO	SD/MI	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 68	2023	L	52	KEBONREJO	SD/MI	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 69	2022	P	41	KEBONREJO	SD/MI	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 70	2023	P	51	KEBONREJO	SD/MI	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 71	2020	L	31	KEBONREJO	S1/S2	Wiraswasta	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Empat
Partisipan 72	2021	L	42	KEBONREJO	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan 73	2023	P	33	kajarharjo kalibaru banyuwangi	SD/MI	Wiraswasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 74	2023	P	33	glenmore	SMA/SLTA	Wiraswasta	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua

Partisipan 75	2020	L	28	Genteng wetan	SMA/SLTA	Wiraswasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 76	2022	P	42	genteng	SMA/SLTA	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 77	2023	L	20	Genteng	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan 78	2020	L	22	Genteng	SMA/SLTA	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 79	2023	L	43	Genteng	SMA/SLTA	Lainnya	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan 80	2020	L	45	gunungsari des. Sumbergondo kec. Glenmore	SMP/SLTP	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 81	2023	L	48	sumbergondo glenmore	SMP/SLTP	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 82	2023	L	29	Kalibaru	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua
Partisipan 83	2020	P	27	Glenmore	SMA/SLTA	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 84	2019	L	36	Glenmore	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 85	2020	L	43	Jln Hayam Wuruk no 70 Banyuwangi	SMP/SLTP	Karyawan Swasta	<Rp. 1.500.000	Roda Empat
Partisipan 86	2020	P	43	Jaln argopuro no 45, Banyuwangi	SD/MI	ASN	<Rp. 1.500.000	Roda Dua

Partisipan 87	2019	L	26	Banyuwangi	SMA/SLTA	Wiraswasta	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000	Roda Dua
Partisipan 88	2023	P	28	Jln argopuro no 2	SMP/SLTP	ASN	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 89	2020	P	22	Kaliwadung RT. 021 RW. 006, Desa Kaligondo, Kec. Genteng, Banyuwangi	SMA/SLTA	Pelajar/Ma hasiswa	<Rp 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 90	2021	L	61	Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	SMA/SLTA	Wiraswasta	Rp1.500.000 - Rp2.500.000	Roda Dua
Partisipan 91	2020	L	27	Songgon	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	Rp1.500.000 - Rp2.500.000	Roda Dua
Partisipan 92	2023	P	25	simbar karangsari, sempu	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	Rp2.500.000 - Rp3.500.000	Roda Dua
Partisipan 93	2022	L	22	wringinrejo, gambiran, banyueangi	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	Rp1.500.000 - Rp2.500.000	Roda Dua
Partisipan 94	2023	L	24	Wringinrejo, Kecamatan Gambiran,	SMP/SLTP	Wiraswasta	Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	Roda Dua

				Kabupaten Banyuwangi				
Partisipan 95	2023	L	49	kalibaru	S1/S2	ASN	>Rp. 3.500.000	Roda Dua
Partisipan 96	2023	L	30	Simbar, Sempu, Banyuwangi	SMA/SLTA	Wiraswasta	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000	Roda Dua
Partisipan 97	2022	L	29	Gambiran, Banyuwangi	SD/MI	Wiraswasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 98	2023	P	40	Kalibaru	SMP/SLTP	Karyawan Swasta	<Rp. 1.500.000	Roda Dua
Partisipan 99	2021	P	26	Jl kadir kalibaruwetan banyuangi	SMA/SLTA	Karyawan Swasta	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000	Roda Dua
Partisipan 100	2022	P	24	Mulyorejo, Wringinrejo, Gambiran, Banyuwangi	SMA/SLTA	Lainnya	<Rp. 1.500.000	Roda Dua

Lampiran 3 Tabulasi Kuisisioner

Partisipan	Sanksi Pajak (X1)					Tingkat Pendapatan (X2)					
	X 1.1	X 1.2	X 1.3	X 1.4	X1	X 2.1	X 2.2	X 2.3	X 2.4	X 2.5	X2
Partisipan 1	3	4	4	4	15	3	3	4	4	3	17
Partisipan 2	4	4	4	4	16	2	2	3	3	3	13
Partisipan 3	4	4	4	4	16	4	3	4	3	4	18
Partisipan 4	5	3	3	3	14	3	3	3	5	3	17
Partisipan 5	4	2	3	4	13	4	4	4	4	4	20
Partisipan 6	4	2	4	5	15	3	3	4	4	3	17
Partisipan 7	3	3	4	3	13	4	4	2	2	4	16
Partisipan 8	4	5	5	5	19	4	3	4	4	3	18
Partisipan 9	4	4	4	4	16	3	2	4	4	3	16
Partisipan 10	3	4	4	4	15	3	3	4	4	4	18
Partisipan 11	4	4	4	4	16	4	3	4	4	4	18
Partisipan 12	3	3	4	4	14	3	3	4	4	4	18
Partisipan 13	4	2	3	3	12	4	3	4	3	4	18
Partisipan 14	4	3	3	3	13	3	3	3	3	3	15
Partisipan 15	4	5	4	4	17	4	3	3	4	3	17
Partisipan 16	5	5	5	5	20	3	4	4	4	3	18
Partisipan 17	1	2	3	4	10	3	4	3	2	1	15
Partisipan 18	4	5	5	4	18	4	2	4	4	4	18
Partisipan 19	3	4	3	4	14	4	5	3	3	4	17

Partisipan 20	1	3	3	3	10	3	2	3	1	3	12
Partisipan 21	4	5	5	5	19	4	4	4	4	4	19
Partisipan 22	5	5	5	5	20	3	2	4	4	4	17
Partisipan 23	4	4	4	4	16	5	4	4	3	4	19
Partisipan 24	4	5	4	4	17	5	4	3	4	4	20
Partisipan 25	5	5	5	5	20	3	3	4	4	4	18
Partisipan 26	5	5	5	5	20	3	5	3	4	3	17
Partisipan 27	5	4	4	5	18	3	3	4	4	5	18
Partisipan 28	4	5	4	5	18	4	5	4	4	5	22
Partisipan 29	4	4	4	4	16	4	4	4	5	4	21
Partisipan 30	5	5	5	5	20	3	3	4	4	4	16
Partisipan 31	3	3	3	3	12	4	3	3	3	3	15
Partisipan 32	3	4	4	3	14	4	3	3	4	3	16
Partisipan 33	4	4	4	4	16	3	4	4	4	4	18
Partisipan 34	4	4	4	4	16	3	4	4	4	4	19
Partisipan 35	4	4	5	5	18	5	3	5	4	4	21
Partisipan 36	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
Partisipan 37	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	20
Partisipan 38	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
Partisipan 39	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	21
Partisipan 40	4	5	4	4	17	4	4	3	3	4	18
Partisipan 41	5	4	5	5	19	3	4	4	3	4	18

Partisipan 42	3	4	5	4	16	4	3	4	4	5	19
Partisipan 43	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
Partisipan 44	4	5	5	4	18	3	4	4	3	3	17
Partisipan 45	5	4	4	3	16	5	4	5	4	5	23
Partisipan 46	4	4	4	4	16	3	3	4	4	4	18
Partisipan 47	4	5	5	4	18	5	4	4	5	4	22
Partisipan 48	4	4	4	4	16	5	3	4	4	4	20
Partisipan 49	4	4	4	4	16	4	3	3	4	4	18
Partisipan 50	2	4	4	4	14	4	4	4	4	4	20
Partisipan 51	3	4	4	5	16	5	4	4	5	4	22
Partisipan 52	2	4	4	4	14	4	3	3	4	3	17
Partisipan 53	5	4	5	4	18	4	3	4	4	4	19
Partisipan 54	4	4	5	4	17	3	4	4	3	5	19
Partisipan 55	4	3	4	3	14	4	3	4	4	4	19
Partisipan 56	4	4	3	3	14	4	4	4	4	4	20
Partisipan 57	4	5	4	3	16	5	5	4	4	5	23
Partisipan 58	4	4	5	4	17	4	3	4	4	4	19
Partisipan 59	4	4	4	4	16	5	4	3	4	4	20
Partisipan 60	4	4	5	3	16	5	4	4	4	4	21
Partisipan 61	4	4	4	4	16	4	4	3	4	4	19
Partisipan 62	4	4	5	3	16	4	3	4	4	4	19
Partisipan 63	4	4	4	5	17	4	3	4	4	4	19

Partisipan 64	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	21
Partisipan 65	5	4	4	4	17	3	4	4	4	4	19
Partisipan 66	5	4	4	4	17	3	4	4	4	4	19
Partisipan 67	5	4	5	3	17	4	4	5	5	4	22
Partisipan 68	5	4	4	3	16	3	4	4	4	4	19
Partisipan 69	5	4	3	4	16	4	3	4	4	4	19
Partisipan 70	4	3	4	4	15	4	3	4	4	3	18
Partisipan 71	5	4	5	4	18	4	4	5	5	4	22
Partisipan 72	5	3	4	3	15	4	4	4	4	4	20
Partisipan 73	4	5	5	3	17	5	3	4	4	5	21
Partisipan 74	4	4	4	3	15	4	5	4	4	4	21
Partisipan 75	4	4	2	2	12	3	4	4	4	4	19
Partisipan 76	4	2	2	3	11	3	4	4	4	4	19
Partisipan 77	5	4	4	4	17	4	4	4	4	4	20
Partisipan 78	4	2	2	4	12	3	4	4	4	4	19
Partisipan 79	5	4	5	4	18	3	3	4	4	4	18
Partisipan 80	4	4	2	4	14	3	4	4	4	4	19
Partisipan 81	4	2	2	3	11	4	4	4	4	4	20
Partisipan 82	4	4	4	3	15	4	4	4	4	4	20
Partisipan 83	4	4	2	3	13	4	4	4	4	4	20
Partisipan 84	4	4	4	4	16	3	3	4	4	4	18
Partisipan 85	4	3	4	4	15	4	4	4	4	4	20

Partisipan 86	5	4	4	4	17	4	4	4	4	4	20
Partisipan 87	5	5	5	5	20	3	3	4	5	5	19
Partisipan 88	4	4	2	4	14	4	4	4	4	4	20
Partisipan 89	5	4	5	4	18	4	5	4	5	4	22
Partisipan 90	4	4	1	4	13	4	3	4	5	4	20
Partisipan 91	4	4	4	3	15	4	3	4	4	4	19
Partisipan 92	4	4	5	4	17	4	3	4	4	4	19
Partisipan 93	4	4	4	4	16	4	3	4	4	4	19
Partisipan 94	4	2	3	4	13	4	4	4	4	4	20
Partisipan 95	2	3	3	3	11	4	4	4	4	5	21
Partisipan 96	4	4	3	4	15	4	4	4	4	4	20
Partisipan 97	4	4	4	3	15	4	4	4	4	3	19
Partisipan 98	5	4	5	4	18	4	3	4	4	4	18
Partisipan 99	5	4	4	4	17	4	4	4	4	3	19
Partisipan 100	3	4	3	3	13	3	3	4	3	4	18

Partisipan	Pemahaman Pajak (X3)							Kesadaran Wajib Pajak (X4)						
	X 3.1	X 3.2	X 3.3	X 3.4	X 3.5	X 3.6	X3	X 4.1	X 4.2	X 4.3	X 4.4	X 4.5	X 4.6	X4
Partisipan 1	5	5	5	5	4	5	22	5	4	5	4	5	5	28
Partisipan 2	4	4	4	4	3	3	22	3	3	4	4	4	4	22
Partisipan 3	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24

Partisipan 4	5	4	4	4	3	3	23	2	3	3	4	3	5	20
Partisipan 5	4	4	4	5	3	4	24	3	3	3	4	4	5	22
Partisipan 6	5	5	5	3	5	5	28	4	4	3	3	3	2	19
Partisipan 7	4	4	4	2	4	3	21	3	4	4	5	2	4	22
Partisipan 8	5	5	5	4	4	4	27	5	4	5	5	5	4	28
Partisipan 9	3	3	4	4	4	4	22	4	3	4	3	3	4	21
Partisipan 10	4	4	4	5	4	4	25	4	3	5	4	3	4	23
Partisipan 11	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 12	5	4	5	5	5	4	28	5	5	4	5	5	4	28
Partisipan 13	4	4	4	3	3	4	22	5	4	3	5	5	3	25
Partisipan 14	3	3	3	3	3	3	18	5	4	4	4	4	4	25
Partisipan 15	4	5	5	4	4	4	26	4	4	3	5	5	4	25
Partisipan 16	1	2	3	4	4	5	19	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 17	2	1	3	5	4	3	18	4	4	5	5	5	5	28
Partisipan 18	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	3	3	4	21
Partisipan 19	2	2	3	3	3	3	16	4	3	3	4	3	4	21
Partisipan 20	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
Partisipan 21	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 22	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
Partisipan 23	4	4	4	5	4	4	25	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 24	4	5	5	5	4	5	28	5	5	5	4	4	5	28
Partisipan 25	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30

Partisipan 26	5	5	5	5	3	3	26	5	3	4	5	5	5	27
Partisipan 27	4	4	5	4	4	3	24	5	3	5	2	5	5	25
Partisipan 28	4	4	5	4	5	4	26	5	5	5	5	4	5	29
Partisipan 29	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 30	4	4	4	4	4	1	21	1	1	2	1	1	1	7
Partisipan 31	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
Partisipan 32	4	4	3	4	4	4	23	2	4	3	2	2	4	17
Partisipan 33	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 34	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 35	5	5	5	5	5	4	29	4	4	4	3	3	4	22
Partisipan 36	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 37	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 38	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 39	5	5	5	5	4	4	28	5	5	4	4	4	5	27
Partisipan 40	3	4	4	5	4	5	25	5	5	5	5	5	5	30
Partisipan 41	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	3	3	2	18
Partisipan 42	4	5	5	5	5	5	29	5	4	3	5	5	5	27
Partisipan 43	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 44	5	4	5	5	4	4	27	3	4	4	4	5	4	24
Partisipan 45	3	5	4	4	4	5	25	5	4	5	3	4	4	25
Partisipan 46	3	4	4	4	4	3	22	3	4	4	4	4	4	23
Partisipan 47	3	4	4	5	4	3	23	4	3	5	4	5	4	25

Partisipan 48	4	3	4	4	4	3	22	3	4	4	4	3	3	21
Partisipan 49	4	4	3	4	4	4	23	5	4	4	4	4	4	25
Partisipan 50	2	2	4	4	4	4	20	4	4	3	4	4	4	23
Partisipan 51	2	4	3	4	4	4	21	5	4	4	4	4	3	24
Partisipan 52	2	3	4	4	4	4	21	4	4	4	5	4	4	25
Partisipan 53	3	3	4	5	4	3	22	5	3	4	4	3	4	23
Partisipan 54	3	4	4	4	3	3	21	4	3	4	4	4	3	22
Partisipan 55	3	4	4	4	3	4	22	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 56	3	4	4	4	3	3	21	4	4	4	3	4	4	23
Partisipan 57	4	5	5	4	3	3	24	4	3	4	3	4	4	22
Partisipan 58	4	3	4	5	4	4	24	4	4	4	3	4	4	23
Partisipan 59	5	4	4	3	4	5	25	4	4	4	5	4	4	25
Partisipan 60	4	4	5	4	3	3	23	5	3	4	3	5	4	24
Partisipan 61	4	4	4	5	3	4	24	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 62	4	4	5	4	3	3	23	4	3	4	3	4	4	22
Partisipan 63	3	4	5	4	4	4	24	4	4	4	3	4	4	23
Partisipan 64	4	3	4	5	4	4	24	4	4	3	4	4	4	23
Partisipan 65	4	4	4	4	3	4	23	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 66	3	4	4	5	3	4	23	3	4	4	4	4	5	24
Partisipan 67	4	4	5	5	3	4	25	4	5	5	4	5	4	27
Partisipan 68	4	4	4	4	3	3	22	4	3	4	4	4	5	24
Partisipan 69	4	4	4	4	3	3	22	4	3	4	3	5	5	24

Partisipan 70	3	3	4	4	3	3	20	3	3	4	4	4	4	22
Partisipan 71	5	5	5	5	4	4	28	5	5	4	3	4	4	25
Partisipan 72	5	5	4	5	4	4	27	4	3	4	3	4	5	23
Partisipan 73	4	4	5	5	3	3	24	4	3	4	4	4	4	23
Partisipan 74	5	5	5	5	4	4	28	4	4	4	4	4	5	25
Partisipan 75	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	5	25
Partisipan 76	4	4	4	4	4	4	24	3	3	4	3	4	4	21
Partisipan 77	4	4	4	5	3	3	23	4	4	4	3	4	4	23
Partisipan 78	4	4	4	4	4	4	24	3	3	4	3	4	4	21
Partisipan 79	4	4	5	5	3	3	24	4	3	4	3	4	4	22
Partisipan 80	4	4	4	4	3	3	22	4	3	4	4	4	4	23
Partisipan 81	4	4	4	4	3	3	22	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 82	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 83	4	4	5	4	3	4	24	4	3	4	4	4	5	24
Partisipan 84	4	5	5	5	3	4	26	4	3	4	3	4	4	22
Partisipan 85	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 86	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 87	4	5	5	5	5	5	29	5	3	4	3	4	4	23
Partisipan 88	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 89	4	5	4	5	4	5	27	5	4	4	4	5	5	27
Partisipan 90	3	4	4	5	4	4	24	4	4	3	4	4	4	23
Partisipan 91	4	4	4	5	3	4	24	4	4	4	3	4	4	23

Partisipan 92	4	4	4	4	3	4	23	4	4	4	3	4	4	23
Partisipan 93	4	3	4	4	3	4	22	4	3	4	3	4	4	22
Partisipan 94	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
Partisipan 95	4	4	4	4	4	3	23	5	4	4	4	4	5	26
Partisipan 96	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	5	4	25
Partisipan 97	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	3	5	24
Partisipan 98	4	3	4	4	3	4	22	4	3	4	4	4	5	24
Partisipan 99	4	4	4	4	4	3	23	4	3	4	4	3	4	22
Partisipan 100	4	4	4	4	4	4	24	4	3	4	4	3	5	23

Partisipan	Penunggakan Pajak (Y)				
	Y 1.1	Y 1.2	Y 1.3	Y 1.4	Y1
Partisipan 1	4	4	4	5	17
Partisipan 2	4	3	4	4	15
Partisipan 3	4	4	4	4	16
Partisipan 4	4	4	4	3	15
Partisipan 5	3	3	4	3	13

Partisipan 6	4	3	4	4	15
Partisipan 7	4	5	5	3	17
Partisipan8	5	3	5	5	18
Partisipan 9	4	3	4	4	15
Partisipan 10	5	3	4	5	17
Partisipan 11	4	3	4	4	15
Partisipan 12	4	4	4	5	17
Partisipan 13	3	3	4	4	14
Partisipan 14	4	4	4	4	16
Partisipan 15	3	3	4	3	13
Partisipan 16	4	4	4	5	17
Partisipan 17	5	4	3	3	15
Partisipan 18	4	3	4	3	14
Partisipan 19	3	3	3	2	11
Partisipan 20	3	3	3	4	13
Partisipan 21	5	5	5	5	20
Partisipan 22	5	5	5	5	20
Partisipan 23	4	3	4	3	14
Partisipan 24	4	3	4	4	15
Partisipan 25	5	5	5	5	20
Partisipan 26	5	5	5	4	19
Partisipan 27	5	4	4	4	17

Partisipan 28	5	5	5	5	20
Partisipan 29	4	4	4	4	16
Partisipan 30	5	4	4	5	18
Partisipan 31	3	3	3	3	12
Partisipan 32	4	3	3	4	14
Partisipan 33	4	4	4	4	16
Partisipan 34	4	4	4	4	16
Partisipan 35	5	3	4	3	15
Partisipan 36	4	3	4	5	16
Partisipan 37	4	4	4	4	16
Partisipan 38	4	4	4	4	16
Partisipan 39	5	3	4	4	16
Partisipan 40	4	4	5	5	18
Partisipan 41	4	4	4	4	16
Partisipan 42	5	4	4	5	18
Partisipan 43	4	4	4	4	16
Partisipan 44	3	4	5	4	16
Partisipan 45	4	4	5	4	17
Partisipan 46	4	4	4	3	15
Partisipan 47	5	4	5	4	18
Partisipan 48	5	4	4	3	16
Partisipan 49	4	3	3	3	13

Partisipan 50	3	4	4	3	14
Partisipan 51	3	3	4	3	13
Partisipan 52	3	4	4	4	15
Partisipan 53	3	4	5	4	16
Partisipan 54	4	3	5	4	16
Partisipan 55	4	3	4	4	15
Partisipan 56	4	3	5	3	15
Partisipan 57	4	4	5	4	17
Partisipan 58	4	3	4	3	14
Partisipan 59	4	3	4	4	15
Partisipan 60	3	4	5	4	16
Partisipan 61	4	3	4	4	15
Partisipan 62	4	3	4	3	14
Partisipan 63	4	3	4	4	15
Partisipan 64	4	3	4	4	15
Partisipan 65	5	4	5	4	18
Partisipan 66	5	4	5	4	18
Partisipan 67	4	3	4	3	14
Partisipan 68	5	4	5	3	17
Partisipan 69	5	3	5	4	17
Partisipan 70	4	3	4	3	14
Partisipan 71	5	3	4	4	16

Partisipan 72	5	4	5	4	18
Partisipan 73	5	4	5	4	18
Partisipan 74	5	4	4	4	17
Partisipan 75	4	4	4	4	16
Partisipan 76	4	4	4	4	16
Partisipan 77	4	3	4	3	14
Partisipan 78	4	4	4	4	16
Partisipan 79	5	4	5	4	18
Partisipan 80	4	3	4	4	15
Partisipan 81	4	3	4	4	15
Partisipan 82	4	4	4	4	16
Partisipan 83	4	4	4	4	16
Partisipan 84	3	3	4	4	14
Partisipan 85	4	4	4	4	16
Partisipan 86	4	4	4	4	16
Partisipan 87	4	3	5	5	17
Partisipan 88	4	4	4	4	16
Partisipan 89	5	4	4	5	18
Partisipan 90	3	3	4	3	13
Partisipan 91	4	4	4	4	16
Partisipan 92	4	3	3	3	13
Partisipan 93	4	3	4	4	15

Partisipan 94	4	4	4	4	16
Partisipan 95	5	4	5	4	18
Partisipan 96	3	3	4	3	13
Partisipan 97	4	3	4	4	15
Partisipan 98	4	3	4	4	15
Partisipan 99	4	4	4	3	15
Partisipan 100	3	3	3	3	12

#### Lampiran 4. Hasil Uji Validitas

##### Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X1)

		Correlations				
		X101	X102	X103	X104	TX1
X101	Pearson Correlation	1	,308**	,311**	,230*	,648**
	Sig. (2-tailed)		,002	,002	,021	,000
	N	100	100	100	100	100
X102	Pearson Correlation	,308**	1	,550**	,365**	,771**
	Sig. (2-tailed)	,002		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X103	Pearson Correlation	,311**	,550**	1	,416**	,808**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X104	Pearson Correlation	,230*	,365**	,416**	1	,661**
	Sig. (2-tailed)	,021	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
TX1	Pearson Correlation	,648**	,771**	,808**	,661**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

##### Hasil Uji Tingkat Pendapatan (X2)

		Correlations					
		X106	X107	X108	X109	X110	TX2
X106	Pearson Correlation	1	,263**	,130	,219*	,292**	,633**
	Sig. (2-tailed)		,008	,199	,029	,003	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X107	Pearson Correlation	,263**	1	,062	,137	,196	,569**
	Sig. (2-tailed)	,008		,541	,173	,051	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X108	Pearson Correlation	,130	,062	1	,476**	,410**	,608**
	Sig. (2-tailed)	,199	,541		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X109	Pearson Correlation	,219*	,137	,476**	1	,302**	,629**
	Sig. (2-tailed)	,029	,173	,000		,002	,000

N	100	100	100	100	100	100
X110 Pearson Correlation	,292**	,196	,410**	,302**	1	,612**
Sig. (2-tailed)	,003	,051	,000	,002		,000
N	100	100	100	100	100	100
TX2 Pearson Correlation	,633**	,569**	,608**	,629**	,612**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Hasil Uji Pemahaman Pajak (X3)

		Correlations						
		X112	X113	X114	X115	X116	X117	TX3
X112 Pearson Correlation		1	,693**	,595**	,235*	,235*	,180	,718**
Sig. (2-tailed)			,000	,000	,019	,019	,074	,000
N		100	100	100	100	100	100	100
X113 Pearson Correlation		,693**	1	,646**	,292**	,268**	,335**	,787**
Sig. (2-tailed)		,000		,000	,003	,007	,001	,000
N		100	100	100	100	100	100	100
X114 Pearson Correlation		,595**	,646**	1	,424**	,246*	,216*	,734**
Sig. (2-tailed)		,000	,000		,000	,014	,031	,000
N		100	100	100	100	100	100	100
X115 Pearson Correlation		,235*	,292**	,424**	1	,187	,251*	,545**
Sig. (2-tailed)		,019	,003	,000		,063	,012	,000
N		100	100	100	100	100	100	100
X116 Pearson Correlation		,235*	,268**	,246*	,187	1	,517**	,583**
Sig. (2-tailed)		,019	,007	,014	,063		,000	,000
N		100	100	100	100	100	100	100
X117 Pearson Correlation		,180	,335**	,216*	,251*	,517**	1	,575**
Sig. (2-tailed)		,074	,001	,031	,012	,000		,000
N		100	100	100	100	100	100	100
TX3 Pearson Correlation		,718**	,787**	,734**	,545**	,583**	,575**	1
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N		100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Hasil Uji Kesadaran Wajib Pajak (X4)

		Correlations						
		X119	X120	X121	X122	X123	X124	TX4
X119	Pearson Correlation	1	,464**	,496**	,376**	,586**	,357**	,762**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X120	Pearson Correlation	,464**	1	,373**	,494**	,386**	,293**	,693**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,003	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X121	Pearson Correlation	,496**	,373**	1	,297**	,494**	,480**	,701**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,003	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X122	Pearson Correlation	,376**	,494**	,297**	1	,449**	,387**	,706**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,003		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X123	Pearson Correlation	,586**	,386**	,494**	,449**	1	,459**	,785**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X124	Pearson Correlation	,357**	,293**	,480**	,387**	,459**	1	,684**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TX4	Pearson Correlation	,762**	,693**	,701**	,706**	,785**	,684**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Hasil Uji Penunggakan Pajak (Y)

### Correlations

		X126	X127	X128	X129	Y
X126	Pearson Correlation	1	,364**	,379**	,387**	,737**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X127	Pearson Correlation	,364**	1	,450**	,349**	,731**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X128	Pearson Correlation	,379**	,450**	1	,366**	,726**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X129	Pearson Correlation	,387**	,349**	,366**	1	,734**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
Y	Pearson Correlation	,737**	,731**	,726**	,734**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas

#### Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak (X1)

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,695	4

#### Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Pendapatan

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,609	5

#### Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Pajak (X3)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,767	6

**Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X4)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,815	6

**Hasil Uji Reliabilitas Penunggakan Pajak (Y)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,709	4

**Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas**

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,48920703
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,081
	Positive	,056
	Negative	-,081
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,107 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

### Lampiran 7. Hasil Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

#### Collinearity Statistics

Model		Tolerance	VIF
1	TX1	,797	1,254
	TX2	,842	1,188
	TX3	,646	1,547
	TX4	,815	1,227

a. Dependent Variable: Y

### Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,556	1,145		,486	,628
TX1	,024	,045	,060	,524	,601
TX2	,037	,052	,079	,711	,479
TX3	,014	,042	,041	,328	,744
TX4	-,033	,034	-,108	-,960	,339

a. Dependent Variable: RES2

### Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Variables Entered/Removed <sup>a</sup>		Method
	Variables Entered	Variables Removed	
1	TX4, TX1, TX2, TX3 <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model	Model Summary <sup>b</sup>			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,563 <sup>a</sup>	,317	,288	1,52024

a. Predictors: (Constant), TX4, TX1, TX2, TX3

b. Dependent Variable: Y

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	101,684	4	25,421	10,999	,000 <sup>b</sup>
	Residual	219,556	95	2,311		
	Total	321,240	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), TX4, TX1, TX2, TX3

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,341	1,910		2,796	,006
Sanksi Pajak	,239	,075	,303	3,192	,002
Tingkat Pendapatan	-,025	,087	-,027	-,290	,773
Pemahaman Pajak	,171	,070	,256	2,427	,017
Kesadaran Wajib Pajak	,128	,057	,211	2,245	,027

a. Dependent Variable: Y

### Lampiran 10. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	Model Summary <sup>b</sup>			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,563 <sup>a</sup>	,317	,288	1,52024

a. Predictors: (Constant), TX4, TX1, TX2, TX3

b. Dependent Variable: Y

**Lampiran 11. Dokumentasi**





## LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NAMA : Eva Oktaviana Wulandari  
 NIM : 20104839  
 JURUSAN : Akuntansi  
 JUDUL : Sank Pajak, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Pajak dan Keradaran Wajib Pajak Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuwangi

No	PENGUJI	REVISI	KETERANGAN
1.	Yuniorita Indah H	Penelitian terdahulu (2.1) pengelompokan lebih detail Metode pengumpulan data ditambahkan observasi & wawancara Bab 3: metode analisis data dilengkapi rumus & penjelasan regresi berganda Interpretasi → penjelasan mengapa berpengaruh tidak berpengaruh	Apr 2024 Apr 2024 10/7/24
2.	Muhammad Rijatus Sholihin	- judul penelitian - variabel penelitian - definisi minimum baik kualitatif & kuantitatif - interpretasi variabel x & y - sesuai dengan konteks pada lembar penelitian	10/7/24 6/7/24
3.	Agus fm	Perbaiki penulisan bab II, tambahkan teori pendukung Perbaiki penulisan sumber data & lampiran	10/7/2024

JEMBER, .....

KA PRODI MANAJEMEN AKUNTANSI/EK.PEMBANGUNAN/D3

